

# ANALISIS AMBANG BATAS LAHAN PEMAKAMAN DI KOTA MAKASSAR



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Perencanaan Wilayah dan Kota Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota  
pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh  
**KARTINI**  
NIM. 60800114072  
M A K A S S A R

**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2018**

# ANALISIS AMBANG BATAS LAHAN PEMAKAMAN DI KOTA MAKASSAR



## Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Perencanaan Wilayah dan Kota Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota  
pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh  
**KARTINI**  
NIM. 60800114072  
M A K A S S A R

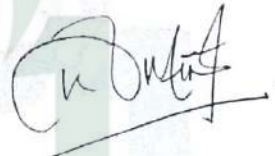
JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2018

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 26 Juli 2018

Penyusun,



**KARTINI**

NIM. 60800114072

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR  
MAKASSAR

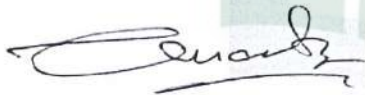
## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Ambang Batas Lahan Pemakaman di Kota Makassar  
Nama Mahasiswa : Kartini  
NIM : 60800114072  
Jurusan : Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota  
Fakultas : Sains dan Teknologi

Disetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Nur Syam AS, ST., M.Si.



Fadhil Surur, ST., M.Si.

Mengetahui

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Ketua Jurusan Teknik Perencanaan  
Wilayah dan Kota



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.  
NIP. 19691205 199303 1 001

Dr. H. Muhammad Anshar, S.Pt., M.Si.  
NIP. 19760603 200212 1 005



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Analisis Ambang Batas Lahan Pemakaman di Kota Makassar" yang disusun oleh Kartini, NIM: 60800114072, mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perencanaan Wilayah Kota dalam Ilmu Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

Samata-Gowa, 26 Juli 2018

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. M. Thahir Maloko, M.HI	(.....)
Sekretaris	: Risnawati K, S.T., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: A. Idham AP, S.T., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Dr. Bahaking Rama, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Nur Syam AS, S.T., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Fadhil Surur, S.T., M.Si	(.....)

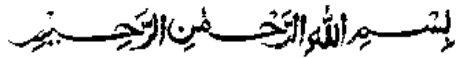
Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.  
NIP. 19691205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR



*‘Assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu’*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata’ala, yang telah melimpahkan rahmat ilmu dan pengetahuan sehingga penulis dapat melakukan penelitian, menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***Analisis Ambang Batas Lahan Pemakaman di Kota Makassar***. Tak lupa pula shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, serta doa tercurah kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau.

Penyusunan skripsi ini merupakan rangkaian sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Sains Dan Teknologi, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari segala kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca sebagai bahan masukan sehingga dapat berguna baik bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya.

Penulis juga menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki serta banyaknya hambatan yang datang dalam proses penyelesaian skripsi ini, namun dengan bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga hambatan tersebut akhirnya dapat dilalui. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulusnya kepada :

1. Teristimewa untuk Ayah tercinta **H. Muh. Yunus**, Ibu tersayang **Hj. Muliana Pani**, dan adik yang kebanggakan **Akmal Hidayah** serta keluarga besar, terima

kasih atas segala doa, bimbingan, nasehat, motivasi dan bantuan materil yang tak ternilai harganya sehingga penulis diberi kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi segala rintangan untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak **Nur Syam AS, ST., M.Si** selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak **Fadhil Surur, ST.,M.Si** selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya untuk membimbing, memberi petunjuk dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si** selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak **Dr. H. Muhammad Anshar, S.Pt., M.Si** selaku Ketua Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu **Risma Handayani, S.IP., M.Si** selaku Sekertaris Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Seluruh Dosen, Staf Akademik, Staf Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Staf Perpustakaan, Pengajar Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
8. Pemerintah Kota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar yang telah berkenan menerima dan memberikan data kepada penulis yang terkait dalam penyusunan skripsi ini.

9. Sepupu terbaikku **Zulhelmi** dan **Muhammad Irfan** yang selama ini telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya tetap membantu penulis melakukan wawancara, memberikan doa, nasehat, ilmu dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku **Aswita Wiryadisuria**, **Yayah Awaliyah**, **Nurwahidah** dan **Siti Hajerianti Sari** yang telah banyak membantu penulis selama ini, semoga persahabatan ini tetap terjaga hingga disurga nanti.
11. Sahabat hijrahku **Haniva Sukma Afrianty S** yang senantiasa berbagi ilmu dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Buat saudara-saudariku di Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota “**Angkatan 2014**” tanpa terkecuali, yang telah membantu penulis selama ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan terkhususnya kepada penulis. Semoga Allah SWT melindungi dan memberikan berkah-Nya serta imbalan kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

***Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu***

Samata-Gowa, 26 Juli 2018

Penulis

Kartini

NIM. 60800114072



## ABSTRAK

Nama Penyusun : Kartini  
NIM : 60800114072  
Judul Skripsi : Analisis Ambang Batas Lahan Pemakaman di Kota Makassar

---

Peningkatan jumlah penduduk Kota Makassar dari tahun 2014-2016 berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kematian sehingga kebutuhan lahan untuk pemakaman tiap tahunnya pun juga terus bertambah sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk yang semakin pesat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar ambang batas lahan pemakaman umum Islam di Kota Makassar dan menyusun arahan perencanaan dalam pengembangan pemenuhan kebutuhan lahan pemakaman ditinjau dari aspek tata ruang. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, proyeksi penduduk dan daya tampung sebagai ambang batas lahan pemakaman. Berdasarkan hasil analisis besaran ambang batas lahan pemakaman umum Islam di Kota Makassar masih mampu menampung jumlah kematian hingga tahun 2023 dengan sistem normal sedangkan untuk sistem tumpuk mampu menampung hingga tahun 2029. Arahan perencanaan dalam pengembangan pemenuhan kebutuhan lahan pemakaman ditinjau dari aspek tata ruang dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu : peruntukan makam untuk masyarakat Kota Makassar, pengoptimalisasian lahan pemakaman, sistem penumpukan makam, hutan lindung sebagai tempat pemakaman umum, pemakaman berdiri, pemindahan makam, pembuangan abu kremasi, pemakaman terpadu dan pemakaman ideal. Sedangkan berdasarkan tinjauan Islam, solusi yang dapat dilakukan adalah peruntukan makam untuk masyarakat Kota Makassar, pengoptimalisasian lahan pemakaman, menjadikan hutan lindung sebagai tempat pemakaman umum, membuat sistem pemakaman terpadu dan pemakaman ideal serta sistem penumpukan jika kondisi lahan sudah tidak ada lagi yang tersedia.

Kata Kunci : Ambang Batas, Kematian, Lahan Pemakaman.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
1. Ruang Lingkup Wilayah .....	7
2. Ruang Lingkup Materi .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Teori Lahan .....	10
B. Karakteristik Lahan .....	12
C. Penggunaan Lahan .....	13
D. Pemanfaatan Lahan .....	14

E. Teori Perkembangan Kota .....	15
F. Konsep Ambang Batas .....	17
G. Daya Tampung sebagai Ambang Batas Lahan .....	19
H. Kematian .....	20
I. Ruang Terbuka Hijau .....	21
1. Pengertian dan Jenis RTH .....	21
2. RTH Pemakaman .....	23
J. Pengertian Pemakaman .....	24
K. Jenis Pemakaman .....	26
L. Kebijakan Pengelolaan Pemakaman .....	28
M. Kerangka Pikir Penelitian .....	32
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33
B. Jenis dan Sumber Data .....	33
1. Jenis Data .....	33
2. Sumber Data .....	33
C. Metode Pengumpulan Data .....	34
D. Variabel Penelitian .....	34
E. Metode Pengolahan dan Analisis Data .....	35
1. Analisis Deskriptif .....	35
2. Analisis Proyeksi Penduduk .....	36
3. Analisis Daya Tampung sebagai Ambang Batas Lahan Pemakaman ...	37
F. Definisi Operasional .....	38

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Wilayah Kota Makassar .....	39
1. Letak Geografis dan Administrasi .....	39
2. Penggunaan Lahan di Kota Makassar .....	41
3. Aspek Kependudukan di Kota Makassar .....	42
B. Perbandingan Persentase Pertumbuhan Jumlah Penduduk dengan Kematian .....	52
C. Identifikasi Tempat Pemakaman Umum Islam .....	53
1. TPU Islam Dadi .....	53
2. TPU Islam Beroanging .....	54
3. TPU Islam Paropo .....	55
4. TPU Islam Maccini .....	56
5. TPU Islam Sudiang Raya .....	57
D. Kondisi Tempat Pemakaman Umum Islam .....	58
1. Luasan Lahan Makam .....	58
2. Sistem Penumpukan .....	59
3. Pola Penataan Makam .....	60
4. Aktivitas Makam .....	60
E. Daya Tampung sebagai Ambang Batas .....	70
F. Arahana Perencanaan dalam Pengembangan Pemenuhan Kebutuhan Lahan Pemakaman ditinjau dari Aspek Tata Ruang .....	75
1. Peruntukan Makam untuk Masyarakat Kota Makassar .....	76
2. Pengoptimalisasian Lahan Pemakaman .....	76
3. Sistem Penumpukan Makam .....	77

4. Hutan Lindung sebagai Tempat Pemakaman Umum .....	79
5. Pemakaman Berdiri .....	81
6. Pemindahan Makam .....	81
7. Pembuangan Abu Kremasi .....	82
8. Pemakaman Terpadu .....	83
9. Pemakaman Ideal .....	84
G. Tinjauan Hukum Islam tentang Penguburan Jenazah .....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kepemilikan RTH .....	21
Tabel 2.	Luas Wilayah dan Pembagian Kelurahan, RW, dan RT Menurut Kecamatan di Kota Makassar, 2016 .....	40
Tabel 3.	Jenis Penggunaan Lahan di Kota Makassar Tahun 2018 .....	41
Tabel 4.	Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Makassar dari Tahun 2014-2017 Menurut Kecamatan .....	42
Tabel 5.	Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Makassar Tahun 2017 .....	44
Tabel 6.	Jumlah Penduduk Agama berdasarkan Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2017 .....	46
Tabel 7.	Perkembangan Jumlah Kematian di Kota Makassar dari Tahun 2013-2017 .....	48
Tabel 8.	Jumlah Kematian Menurut Agama dan Bulan di Kota Makassar Tahun 2017 .....	49
Tabel 9.	Jumlah Kematian Menurut Penguburan di Kota Makassar Tahun 2017 .....	50
Tabel 10.	Jumlah Kematian Menurut Penguburan didalam dan diluar Kota Makassar Tahun 2017 .....	52
Tabel 11.	Perbandingan Persentase Pertumbuhan Jumlah Penduduk dengan Jumlah Kematian di Kota Makassar .....	53
Tabel 12.	Dokumentasi Aktivitas didalam setiap TPU Islam Milik Pemerintah Kota Makassar Tahun 2018 .....	61
Tabel 13.	Proyeksi Kematian Agama Islam untuk 20 tahun kedepan dirinci	

per 5 tahun di Kota Makassar .....	70
Tabel 14. Estimasi Kebutuhan Jumlah Lahan Pemakaman di Kota Makassar dalam 20 tahun kedepan .....	71
Tabel 15. Ambang Batas Kebutuhan Lahan Pemakaman di Kota Makassar .....	72
Tabel 16. Daya Tampung Lahan TPU Islam di Kota Makassar dengan Sistem Tumpuk .....	73
Tabel 17. Ambang Batas Daya Tampung Lahan Pemakaman di Kota Makassar dengan Sistem Tumpuk .....	74



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kerangka Pikir Penelitian .....	32
Gambar 2.	Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Makassar dari Tahun 2014-2017 Menurut Kecamatan .....	43
Gambar 3.	Grafik Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Makassar Tahun 2017 .....	45
Gambar 4.	Grafik Jumlah Penduduk Agama berdasarkan Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2017 .....	47
Gambar 5.	Grafik Perkembangan Jumlah Kematian di Kota Makassar Tahun 2016 .....	48
Gambar 6.	Grafik Jumlah Kematian Menurut Agama dan Bulan di Kota Makassar Tahun 2017 .....	49
Gambar 7.	TPU Islam Dadi .....	54
Gambar 8.	TPU Islam Beroanging .....	55
Gambar 9.	TPU Islam Paropo .....	56
Gambar 10.	TPU Islam Maccini .....	57
Gambar 11.	TPU Islam Sudiang Raya .....	58
Gambar 12.	Peta Lokasi TPU Islam Dadi .....	64
Gambar 13.	Peta Lokasi TPU Islam Beroanging .....	65
Gambar 14.	Peta Lokasi TPU Islam Paropo .....	66
Gambar 15.	Peta Lokasi TPU Islam Maccini .....	67
Gambar 16.	Peta Lokasi dan Kondisi Lahan TPU Islam Sudiang Raya .....	68
Gambar 17.	Sebaran TPU Islam di Kota Makassar .....	69
Gambar 18.	Grafik Ambang Batas Kebutuhan Lahan Pemakaman di	

	Kota Makassar .....	72
Gambar 19.	Grafik Ambang Batas Lahan Pemakaman di Kota Makassar dengan Sistem Tumpuk.....	74
Gambar 20.	Ukuran Makam dan Model Sistem Blok dalam Pemakaman .....	77
Gambar 21.	Ilustrasi Bentuk setiap Makam .....	84
Gambar 22.	Ilustrasi Model Pemakaman yang sesuai Syariat Islam .....	84
Gambar 23.	Ilustrasi Jalan Setapak diantara Makam .....	85
Gambar 24.	Ilustrasi Papan Informasi disetiap Pemakaman .....	85
Gambar 25.	Bentuk Liang Lahad .....	88

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk pilihan yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk ciptaan-Nya yang lain (Sada, 2016). Makhluk Allah SWT yang memiliki keunggulan dan segala keistimewaan seperti akal yang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk (Amin, 2011). Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah dengan bermacam-macam istilah, seperti : *Turaab*, *Thieen*, *Shal-shal*, dan *Sulalah* (Sada, 2016). Salah satu firman Allah SWT tentang penciptaan manusia adalah Q.S Al-Mu'minuun (23) : 12-16.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا  
النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أُنشَأْنَاهُ  
خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ  
الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾

Terjemahnya :

Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (Rahim). Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang baik. Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati. Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan (dari kuburmu) pada hari kiamat (Departemen Agama RI, 2007).

Ayat tersebut menceritakan tentang proses terjadinya manusia dari awal diciptakan (Basit, 2014). Awal kejadian manusia yang dibentuk dari saripati tanah



yaitu Adam a.s. Allah menciptakan Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk (Amin, 2011). Kemudian manusia-manusia sesudahnya diciptakan-Nya dari setetes air mani (Jawas, 2010).

Menurut penafsiran Shihab (2005) pada surah Al-Mu'minun (23):12-16 menjelaskan bahwa *dan sesungguhnya kami bersumpah bahwa Kami telah menciptakan manusia*, yakni jenis manusia yang kamu saksikan, bermula *dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya yakni saripati itu nuthfah yang disimpan dalam tempat yang kokoh*, yakni rahim ibu. *Kemudian Kami ciptakan yakni jadikan nuthfah itu 'alaqah, lalu Kami ciptakan yakni jadikan 'alaqah itu mudhghah yang merupakan sesuatu yang kecil sekerat daging, lalu Kami ciptakan yakni jadikan mudhghah itu tulang belulang, lalu kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Kemudian Kami mewujudkannya yakni tulang yang terbungkus daging itu menjadi - setelah Kami meniupkan ruh ciptaan Kami kepadanya – makhluk lain daripada yang lain yang sepenuhnya berbeda dengan unsur-unsur kejadiannya yang tersebut di atas bahkan berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Maka Maha banyak lagi mantap keberkahan yang tercurah dari Allah, Pencipta Yang Terbaik. Kemudian, sesungguhnya kamu wahai anak cucu Adam sekalian sesudah itu, yakni sesudah melalui proses tersebut dan ketika kamu berada di pentas bumi ini dan melalui lagi proses dari bayi, anak kecil, remaja, dewasa, tua dan pikun, benar-benar kamu akan mati baik pada masa pikun maupun sebelumnya. Kemudian setelah kamu mati baik pada masa pikun maupun sebelumnya. Kemudian setelah kamu mati dan dikuburkan, sesungguhnya kamu sekalian pada hari Kiamat nanti akan dibangkitkan dari kubur kamu untuk dimintai pertanggung jawaban, lalu masing-masing Kami beri balasan dan ganjaran.*

Setiap manusia akan mengalami sebuah proses kehidupan yang dimulai dari kelahiran hingga kematian (Arifin, 2016). Demikianlah, manusia pasti akan sampai pada akhir kehidupannya, kematian akan menyapa semua manusia tanpa terkecuali (Mubarak, 2015). Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ankabut (29) : 57.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾

*Terjemahnya :*

*Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan (Departemen Agama RI, 2007).*

Menurut penafsiran Shihab (2007) pada surah Al-Ankabut (29):57 menjelaskan bahwa Dan hendaklah kamu mengetahui dan menyadari bahwa cepat atau lambat kamu pasti akan mati karena setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian, setelah kematian dan kebangkitan dari kubur, hanya kepada Kami saja kamu dikembalikan, baik yang mukmin yang sempurna iman dan amalnya maupun yang sekadar beriman tanpa amal saleh, demikian juga yang kafir.

Saat seseorang meninggal maka akan diperlukan sepetak lahan untuk mengubur jasadnya (Arifin, 2016). Penguburan merupakan sunnatullah yang sudah berlaku sejak pertama kali adanya mayat di muka bumi ini (Istiqomah, 2016). Prosesi pemakaman jenazah dalam tanah sebenarnya merupakan pemuliaan kepada jenazah itu sendiri terutama kaum Muslimin karena kita telah mengembalikannya ke tempat asal penciptaannya, yaitu tanah (Yasir, 2016). Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Thaahaa (20) ayat 55.

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴿٥٥﴾

*Terjemahnya :*

*Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain (Departemen Agama RI, 2007).*

Peran tanah yang semakin vital membawa persoalan baru bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait yakni ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tanah memunculkan fenomena penting (Affandy, 2015). Jumlah manusia dan aktivitas beserta berbagai unsur buataannya akan terus bertambah, sedangkan alam tidak berkembang bahkan terus menerus dipaksa, didesak, dan diubah untuk dapat menampung (Kuswartojo et.al, 2005). Perkembangan aktivitas penduduk menyebabkan lahan yang tersedia lebih difokuskan kepada penyediaan lahan untuk permukiman penduduk serta kegiatan perekonomian (Wulandari, 2014).

Kebutuhan tanah bagi kepentingan umum salah satunya adalah untuk tanah pemakaman (Affandy, 2015). Pengelolaan tempat pemakaman umum atau TPU merupakan salah satu fasilitas yang harus dimiliki suatu kota (Tukiman, 2007). Tempat pemakaman umum merupakan jenis pemanfaatan lahan yang bersifat LULU (*Locally Unwanted Land Use*) yaitu lahan yang berfungsi untuk kegiatan yang mutlak diperlukan namun tidak diinginkan keberadaanya (Aji, Suprayogi, & Wijaya, 2015).

Beberapa macam makam baik yang dibedakan berdasarkan agama maupun hal lain, pemakaman berdasarkan agama contohnya makam Islam dan makam Nasrani sedangkan klasifikasi makam juga dapat didasarkan pada hal lain misalnya makam Pahlawan dan makam Cina. Penyebutan macam-macam makam tersebut berkaitan dengan peruntukan orang yang dimakaman dan status tanah (Affandy, 2015).

Keberagaman jenis tempat pemakaman di Indonesia menandakan bahwa pemenuhan kebutuhan tanah pemakaman bagi masyarakat Indonesia tidak masalah. Namun realita didalam masyarakat menunjukkan sebaliknya. Hal ini

dapat dilihat dalam pemberitaan berbagai media massa maupun eletronika yang akhir-akhir ini menunjukkan banyaknya permasalahan mengenai tanah pemakaman (Affandy, 2015). Permasalahan lahan pemakaman dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi salah satu masalah sosial dalam kehidupan bangsa Indonesia khususnya di Kota Makassar (Adhyaksa, 2017).

Salah satu kasus yang pernah terjadi di Kota Makassar yakni salah satu keluarga terpaksa menunda penguburan keluarganya yang meninggal dunia dikarenakan tidak memiliki kemampuan untuk mengurus segala hal yang terkait dengan pengadaan atau pembelian perlengkapan mayat (Adhyaksa, 2017). Kelangkaan ketersediaan lahan untuk pemakaman menjadikan masyarakat yang membutuhkan tanah pemakaman semakin sulit memenuhi kebutuhannya akan tanah pemakaman (Affandy, 2015).

Kota Makassar memiliki luas wilayah sebesar 175,77 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk di tahun 2016 sebanyak 1.469.601 jiwa sehingga tingkat kepadatan penduduk mencapai 8.361 jiwa/km<sup>2</sup>. Peningkatan jumlah penduduk Kota Makassar dari tahun 2014-2016 berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kematian pula yakni di tahun 2013 jumlah kematian sebanyak 3.252 jiwa, kemudian di tahun 2014 sebanyak 3.177 jiwa, di tahun 2015 meningkat sebanyak 3.251 jiwa dan terus meningkat di tahun 2016 menjadi 3.434 jiwa sehingga rata-rata angka kematian di Kota Makassar dari tahun 2012-2016 mencapai 3,224 jiwa yang meninggal per tahun (Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2017).

Menurut Farhan (2016) penambahan penduduk yang terus meningkat, baik akibat dari faktor kelahiran maupun urbanisasi secara tidak langsung membuat angka kematian ikut meningkat juga merupakan salah satu faktor permasalahan

lahan pemakaman. Dengan demikian, kebutuhan lahan untuk pemakaman tiap tahunnya pun juga akan terus bertambah sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk yang sangat pesat (Adhyaksa, 2017).

Populasi penduduk yang semakin bertambah dan akan mengalami kematian setiap saat tentu memerlukan sebuah lahan untuk dimakamkan, terkhususnya untuk seorang muslim yang ketika meninggal akan dikubur sedangkan lahan pemakaman saat ini semakin terbatas. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah kematian dan luas lahan pemakaman yang tersedia sehingga muncullah beberapa permasalahan tentang lahan pemakaman. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penelitian tentang **“Analisis Ambang Batas Lahan Pemakaman di Kota Makassar”** sehingga mampu memberikan inovasi pengembangan lahan pemakaman sesuai dengan aspek penataan ruang dalam hal ini menjaga pemanfaatan lahan perkotaan yang berkelanjutan.

## ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar ambang batas lahan pemakaman umum Islam di Kota Makassar?
2. Bagaimana arahan perencanaan dalam pengembangan pemenuhan kebutuhan lahan pemakaman ditinjau dari aspek tata ruang ?



### ***C. Tujuan Penelitian***

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui besar ambang batas lahan pemakaman umum Islam di Kota Makassar.
2. Menyusun arahan perencanaan dalam pengembangan pemenuhan kebutuhan lahan pemakaman ditinjau dari aspek tata ruang.

### ***D. Manfaat Penelitian***

1. Menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kota Makassar sebagai pengambil kebijakan penataan ruang dalam perencanaan kota.
2. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi yang akan melakukan penelitian lanjutan.

### ***E. Ruang Lingkup Penelitian***

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Ruang Lingkup Wilayah**

Ruang lingkup wilayah atau kajian wilayah studi adalah lahan pemakaman umum Islam Kota Makassar milik pemerintah yang saat ini terdapat 5 tempat pemakaman umum (TPU) diantaranya TPU Islam Dadi, TPU Islam Beroanging, TPU Islam Paropo, TPU Islam Maccini dan TPU Islam Sudiang Raya.

## **2. Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup materi dari penelitian ini adalah mengetahui besaran ambang batas lahan pemakaman umum untuk Islam milik pemerintah sehingga menjadi dasar dalam menyusun strategi yang akan dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan lahan pemakaman Kota Makassar di masa depan.

### ***F. Sistematika Pembahasan***

Dalam penulisan penelitian ini pembahasan dilakukan dengan sistematika guna memudahkan dalam penganalisaan. Sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang kajian teori yang melandasi dan berkaitan dengan kepentingan analisis studi antara lain teori lahan, karakteristik lahan, penggunaan lahan, pemanfaatan lahan, teori perkembangan kota, konsep ambang batas, daya tampung sebagai ambang batas lahan, kematian, ruang terbuka hijau, pengertian pemakaman, jenis pemakaman, kebijakan pengelolaan pemakaman dan kerangka pikir penelitian

### **BAB III    METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang diantaranya terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, metode pengolahan dan analisis data serta definisi operasional.

### **BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat tentang gambaran umum wilayah Kota Makassar, perbandingan persentase pertumbuhan jumlah penduduk dengan kematian, identifikasi tempat pemakaman umum Islam, kondisi tempat pemakaman umum Islam, daya tampung sebagai ambang batas, arahan perencanaan dalam pengembangan pemenuhan kebutuhan lahan pemakaman ditinjau dari aspek tata ruang dan tinjauan hukum islam tentang penguburan jenazah.

### **BAB V    PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Teori Lahan***

Lahan (*land*) adalah permukaan daratan dengan kekayaan benda-benda padat, cair, dan bahkan benda gas. Pengertian lahan adalah suatu daerah di permukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yaitu adanya persamaan dalam hal geologi, geomorfologi, atmosfer, tanah, hidrologi dan penggunaan lahan, sifat-sifat tersebut adalah berupa iklim, batuan dan struktur, bentuk lahan, dan proses, jenis tanah, tata air, dan vegetasi/tumbuhannya (Yusuf, 2016).

Menurut Haeruddin (1997) dalam Yusuf (2016) lahan adalah areal atau kawasan yang diperuntukkan untuk penggunaan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam satuan hektar (ha). Sedangkan pola penggunaan lahan adalah areal model atau bentuk penggunaan lahan diterapkan, seperti perladangan, tegalan, hutan, penghijauan, perkampungan, dan lain-lain. Lahan merupakan bagian dari bentang alam (*landscape*) yang mencakup pengertian lingkungan fisik termasuk iklim, topografi/relief, tanah, hidrologi, dan bahkan keadaan vegetasi alami (*natural vegetation*) yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Pengertian lahan yaitu tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya ada pemiliknya (perorangan atau lembaga). Misalnya dapat dikatakan : tata guna lahan di kota. Sebagaimana disebutkan di atas dalam tata guna tanah, termasuk juga samudera dan laut serta daratan yang tidak dihuni (antartika) yang tidak ada pemilik perorangan atau lembaga, kalau pemiliknya adalah seluruh manusia (Jayadinata, 1999 dalam Yusuf, 2016).

Lahan adalah sebagai ruang (*space*) yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, pengertian memandang lahan dari sudut ekonomi regional atau dari sudut pembangunan wilayah. Lahan dan manusia merupakan sumber daya yang paling besar, karena dari campur tangan manusialah lahan yang ada dapat berubah/dirubah fungsinya misalnya dari lahan pertanian menjadi kawasan permukiman atau kawasan industri. Dengan demikian lahan adalah ruang di permukaan bumi dapat sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi, dimana dalam pemanfaatannya hendaknya dilakukan secara benar dengan mempertimbangkan kelestariannya (Yusuf, 2016).

Lahan sebagai subjek penggunaan lahan aktivitas manusia terletak pada suatu batuan atau kelompok batuan dengan struktur geologi tertentu. Di permukaan bumi ini yang merupakan tempat bagi manusia melakukan hampir semua aktivitasnya terhadap berbagai tipe batuan dan struktur geologinya. Tipe batuan dan struktur geologi yang bervariasi tersebut memiliki karakteristik tertentu sebagai responnya terhadap aktivitas manusia untuk setiap batuan itu berbeda-beda, oleh sebab itu dalam melakukan evaluasi sumber daya lahan sebagai dasar untuk memanfaatkannya perlu memperhatikan fenomena geologi (Ernawati, 2003 dalam Kartikasari, 2011).

Menurut Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007) dalam Jalaluddin (2013) lahan merupakan suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, hidrologi, dan vegetasi dimana variabel-variabel tersebut dapat mempengaruhi potensi penggunaannya. Sedangkan Lahan menurut Arsyad (2002) dalam Kartikasari (2011) diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air, flora, fauna serta bentukan hasil budaya manusia. Dalam hal ini lahan yang



mengandung pengertian ruang dan tempat. Lahan juga diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan termasuk didalamnya juga hasil kegiatan manusia di masa lalu dan sekarang (Kartikasari, 2011).

### **B. Karakteristik Lahan**

Lahan selalu berkaitan dengan keperluan dan kepentingan manusia. Makna suatu komponen lahan bagi kehidupan manusia dapat berubah sejalan dengan perubahan jaman. Jaman berubah berkenaan dengan perubahan aspirasi sosial, perspektif ekonomi, sosial politik serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka pengertian lahan bersifat dinamis. Komponen lahan yang sama dan dalam keadaan yang sama, akan tetapi berada di tempat yang berbeda dapat bermakna lain bagi kehidupan manusia. Hal ini dapat disebabkan karena komponen pendampingnya berbeda sehingga berinteraksi berbeda atau karena perbedaan kemudahan mencapai tempat atau melintasi medan sehingga kesempatan penggunaannya berbeda. Semuanya ini selanjutnya mengubah masalah komparatifnya sehubungan dengan perbedaan teknik dan biaya pengusahaannya yang diperlukan. Maka lahan sebagai sumber daya berkekhasan tempat (*location specific*). Mengingat kedinamisan dan kekhasan tempat maka lahan dikatakan suatu sistem sumberdaya yang bermatra ruang dan waktu (Notohadiprawiro, 2006).

Beberapa sifat atau karakteristik lahan yang dikemukakan oleh Drabkin (1980) dalam Yusuf (2016) adalah sebagai berikut:

1. Secara fisik, lahan merupakan aset ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh kemungkinan penurunan nilai dan harga, dan tidak terpengaruhi oleh waktu, lahan juga merupakan aset yang terbatas dan tidak bertambah besar kecuali melalui reklamasi.
2. Perbedaan antara lahan tidak terbangun dan lahan terbangun adalah lahan tidak terbangun tidak akan dipengaruhi oleh kemungkinan penurunan nilai, sedangkan lahan terbangun nilainya cenderung turun karena penurunan nilai struktur bangunan yang ada di atasnya. Tetapi penurunan nilai struktur bangunan juga dapat meningkatkan nilai lahannya karena adanya harapan peningkatan fungsi penggunaan lahan tersebut selanjutnya.
3. Lahan tidak dapat dipindahkan tetapi sebagai substitusinya intensitas penggunaan lahan dapat ditingkatkan. Sehingga faktor lokasi untuk setiap jenis penggunaan lahan tidak sama.
4. Lahan tidak hanya berfungsi untuk tujuan produksi tetapi juga sebagai investasi jangka panjang atau tabungan. Keterbatasan lahan dan sifatnya yang secara fisik tidak terdepresiasi membuat lahan menguntungkan sebagai tabungan. Selain itu investasi lahan berbeda dengan investasi barang ekonomi yang lain, dimana biaya perawatannya (*maintenance cost*) hanya meliputi pajak dan *interest charges*. Biaya ini relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan lahan tersebut.

### ***C. Penggunaan Lahan***

Menurut Lillesand dan Kiefer (1990) dalam Amalia (2016) penggunaan lahan merupakan istilah yang berkaitan dengan jenis kenampakan yang ada di

permukaan bumi. Penggunaan lahan biasanya meliputi segala jenis kenampakan dan sudah dikaitkan dengan aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan (Purwantoro & Saiful, 2000 *dalam* Amalia, 2016), misalnya pada sektor pertanian, lahan digunakan orang untuk areal persawahan, kebun, dan ladang, sedangkan untuk bidang lainnya lahan digunakan untuk permukiman, prasarana umum, pekarangan, dan lain-lain (Amalia, 2016).

Penggunaan lahan yang terjadi di suatu wilayah cenderung bersifat dinamis. Kondisi ini disebabkan karena perubahan penggunaan lahan di suatu wilayah merupakan pencerminan upaya (tindakan) dan interaksi manusia dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam beserta kondisi lingkungan yang menyertainya. Fenomena tersebut pada gilirannya akan berakibat pada perubahan mutu lingkungan hidup dan peningkatan nilai lahan. Peningkatan nilai lahan tersebut apabila dikaitkan dengan wilayah *urban* (perkotaan) akan lebih banyak berhubungan dengan letak kestrategisannya (faktor lokasi), sedangkan untuk wilayah perdesaan (*rural*), peningkatan nilai lahan tersebut lebih banyak disebabkan karena faktor kesuburan (kualitas) lahan (Utoyo, 2012 *dalam* Amalia, 2016).

#### ***D. Pemanfaatan Lahan***

Pemanfaatan lahan didefinisikan sebagai segala macam bentuk intervensi manusia secara siklis dan permanen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat material maupun spiritual yang berasal dari lahan (Juhadi, 2007 *dalam* Amalia, 2016). Yunus (2001) *dalam* Amalia (2016) juga mendefinisikan pemanfaatan lahan sebagai cara atau pemanfaatan spesifik atas lahan untuk

memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sementara itu, Suyana (1988) dalam Amalia (2016) juga menegaskan bahwa pemanfaatan lahan merupakan perwujudan proses interaksi antar komponen lingkungan hidup yaitu antara manusia sebagai komponen biotik dan lahan sebagai komponen abiotik. Interaksi kedua komponen tersebut berlangsung dengan bervariasi dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu.

Dijelaskan pula bahwa terwujudnya pola pemanfaatan lahan di suatu tempat dan dalam kurun waktu tertentu dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab dan atau pembatas yang berhubungan dengan karakteristik masyarakat, tercermin dalam jumlah populasi serta bentuk atau tingkat kebudayaan, dan kondisi tanah yang dipengaruhi oleh komponen-komponen lingkungan fisik lainnya. Meskipun terdapat beberapa definisi yang membedakan pengertian penggunaan dan pemanfaatan lahan, namun beberapa literatur mengatakan bahwa pengertian penggunaan lahan dan pemanfaatan lahan adalah sama yaitu mengenai kegiatan manusia di muka bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Vink, 1975 dalam Amalia, 2016).

#### ***E. Teori Perkembangan Kota***

Menurut Bintarto (1977) dalam Syahar (2012) Kota dikatakan sebagai sebuah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya. Oleh karenanya kota juga memiliki permasalahan yang kompleks karena di kota berkumpul banyak orang dengan kegiatan yang beragam dan

kebutuhan yang berlainan antara satu dengan yang lain sehingga ada hal yang terpenuhi dan ada yang tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan permasalahan seperti pemerataan pembangunan, ketentraman, kepadatan penduduk dan lainnya (Syahar, 2012).

Menurut Ilhami (1990) dalam Kurniawati (2010) sebagian besar terjadinya kota adalah berawal dari desa yang mengalami perkembangan secara pasti. Faktor yang mendorong perkembangan desa menjadi kota adalah karena desa berhasil menjadi pusat kegiatan tertentu, misalnya desa menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pertambangan, pusat pergantian transportasi, seperti menjadi pelabuhan, pusat persilangan/pemberhentian kereta api, terminal bus dan sebagainya.

Kota merupakan konsentrasi rumah tangga di pinggir-pinggir sungai yang diorganisasi mengelilingi penguasa atau biasanya pemimpin agama yang kemudian diteruskan pengendalian yang sistematis dan kontinu terhadap panen, tenaga kerja, dan lain-lain. Kota modern di barat pada abad pertengahan dan bahkan sebelum revolusi industri umumnya masih tergantung dari sistem pertanian yang belum memakai alat mesin disamping beberapa kota yang sekaligus memang menjadi pusat perdagangan nasional dan internasional. Keadaan tersebut menjadi sebab kota berkembang sangat terbatas dan bila kota bertumbuh di luar batas kemampuan suplai hasil pertanian (makanan) dari "*hinterland*" (daerah sekitarnya) maka kota tersebut akan mengalami kesulitan makanan, dan untuk mempertahankan eksistensi pertumbuhan tersebut sering dilakukan penaklukan daerah sekeliling atau daerah lain demi memperbesar suplai bahan makanan (Kurniawati, 2010).

#### ***F. Konsep Ambang Batas***

Konsep ambang batas dikembangkan oleh Kolowski (1997) dalam Muta'ali (2012) dengan mengasumsikan bahwa perkembangan wilayah (kota) dihadapkan pada kendala atau keterbatasan fisik yang berasal dari lingkungan alam maupun buatan. Kemampuan daya dukung atau daya tampung wilayah ditentukan oleh keterbatasan atau ambang batas. Secara umum terdapat tiga faktor yang menjadi penentu keterbatasan ambang batas perluasan kota, yaitu :

1. Limitasi lingkungan alam : Karakteristik fisiografis wilayah
  - a. Areal perlindungan (kawasan lindung), berupa kenampakan alam yang memiliki fungsi lindung, baik lindung bawahan (hutan lindung) maupun lindung setempat (sempadan laut, sungai, danau);
  - b. Areal rawan bencana (kawasan rawan bencana);
  - c. Kondisi tanah, khususnya terkait dengan jenis-jenis tanah tertentu yang memiliki daya dukung dan kesuburan tanah;
  - d. Hidrologi, yaitu areal yang memiliki badan air seperti sungai, danau, mata air, termasuk limitasi pada daerah yang memiliki kelangkaan air tanah.
2. Limitasi penggunaan lahan berupa kawasan terbangun yang sudah bisa dikembangkan lagi, bisa berupa permukiman, industri, perdagangan dan jasa, wisata, pendidikan, taman kota, tempat-tempat bersejarah (*heritage*), dan sebagainya.
3. Limitasi lingkungan binaan berupa infrastruktur dan utilitas wilayah dan sistem transportasi berupa sistem pemasok air (PAM), persampahan, sanitasi, jalan/transportasi, energi, telekomunikasi dan sebagainya.



Limitasi tersebut diatas menjadi batas ambang (daya dukung) perkembangan wilayah dan jika dipaksakan melampaui batas ambang tersebut maka akan berdampak buruk bagi lingkungan dan tidak jarang akan menimbulkan efek bencana (Muta'ali, 2012).

Menurut Kozlowski (1997) dalam Muta'ali (2012) terdapat empat dimensi lingkungan utama yang memberikan hubungan dimensi batas ambang pembangunan yaitu :

1. Territorial, menunjukkan areal tempat aktivitas dikerjakan
2. Kuantitatif, menunjukkan tingkat aktivitas yang dibangun
3. Kualitatif, menunjukkan jenis output yang dapat dicapai
4. Temporal, menunjukkan tingkat pembangunan yang dapat diterima atau periode waktu yang diijinkan tempat pembangunan berlangsung.

Analisis Ambang (*threshold analysis*) sebagai pengarah perencanaan kota hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengarah guna mendukung suatu perencanaan pembangunannya secara objektif. Terdapat tiga hal yang berpengaruh di dalam perkembangan kota yaitu faktor fisiografis, faktor prasarana (infrastruktur), dan faktor pola tata guna lahan tanah dan status lahan. Limitasi tersebut telah menyebabkan adanya suatu 'ambang' atau '*threshold*' (batasan) di dalam suatu usaha pengembangan dan pertumbuhan kota ataupun suatu lingkungan tertentu. Limitasi ini bukan merupakan sesuatu mutlak tidak dapat diatasi tetapi dalam usaha mengatasinya akan memerlukan suatu investasi tertentu yang melebihi investasi normal (Sujarto , 2003).

Uji *threshold* merupakan salah satu pengujian inderawi yang dilakukan untuk mengetahui ambang batas konsentrasi sebuah sampel (Agustiar, 2017).

Menurut Afrianto (2008) dalam Agustiar (2017) Penentuan *threshold* digunakan untuk menentukan tingkat konsentrasi terendah suatu substansi yang masih dapat dideteksi (*absolute threshold*) atau perubahan konsentrasi terkecil suatu substansi yang masih dapat dideteksi perubahannya (*difference threshold*). Tujuan dilakukannya uji *threshold* yaitu untuk mengetahui nilai ambang batas suatu substansi guna menentukan range konsentrasi pada suatu penelitian (Agustiar, 2017).

#### **G. Daya Tampung sebagai Ambang Batas Lahan**

Konsep daya tampung sebenarnya kebalikan dari kepadatan penduduk namun dengan menggunakan perbandingan atau standar yang ada tentang kebutuhan lahan (Muta'ali, 2012). Apabila nilai kebutuhan lahan telah melebihi daya tampung maka telah melewati nilai ambang batas lahan pemukiman.

Ambang batas dikenal dalam perencanaan kota sebagai batasan fisik yang dihadapi oleh kota yang akan diperluas dan biaya untuk mengatasi batasan-batasan ini. Analisis metode ambang batas memperlihatkan identifikasi atas batasan-batasan ambang batas. Perhitungan atas biaya ambang batas, dan penentuan tentang semua akibat pelampauan. Sesungguhnya metode ini memberikan sarana untuk evaluasi berbagai kemungkinan perkembangan kota. Pengalaman praktek dan penelitian paling mutakhir tidak hanya memastikan kegunaan analisis ambang batas dalam perencanaan kota tetapi juga menunjukkan kemungkinan yang amat luas bagi perkembangan analisis ambang batas selanjutnya dan untuk penerapan cara pemikiran yang menjiwai metode ini terhadap masalah-masalah perencanaan yang dianggap sebagai melebihi

lingkungan perkotaan klasik atau tradisional (Kozlowski, 1997).

Nilai ambang batas berarti ukuran bagi lingkungan berupa areal lahan, daerah perairan badan air (sungai, danau, teluk, dll) serta ruang udara, yang menyatakan batas tingkat pencemaran atau gangguan yang diperbolehkan memengaruhi lingkungan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku (Staf, 2018).

#### **H. Kematian**

Salah satu dari tiga komponen demografi yang mempengaruhi struktur penduduk adalah kematian atau mortalitas. Tinggi rendahnya tingkat kematian penduduk di suatu daerah akan berpengaruh pada pertumbuhan penduduk (Mantra, 2003 *dalam* Amalia, 2016). Mati merupakan peristiwa hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup (Utomo, 1985 *dalam* Amalia, 2016). Definisi tersebut menjelaskan bahwa keadaan mati hanya bisa terjadi jika sudah terjadi kelahiran hidup, dengan demikian keadaan mati selalu didahului oleh keadaan hidup, atau dengan kata lain, mati tidak pernah ada jika tidak ada kehidupan, sedangkan hidup selalu diawali dengan lahir hidup (*live birth*) (Mantra, 2003 *dalam* Amalia, 2016).

Semua penduduk tidak akan mengalami kemungkinan yang sama untuk meninggal. Perubahan tersebut tergantung dari beberapa faktor dan salah satu yang terpenting adalah masalah umur. Angka kasar tidak memperhitungkan faktor-faktor yang relevan tersebut yang dihasilkan hanya nilai rata-rata untuk semua penduduk yang meninggal (Pollard & Yusuf, 1984 *dalam* Amalia, 2016). Angka kematian memberikan informasi tentang kematian dalam suatu populasi. Ukuran

dasar tingkat kematian kasar adalah *Crude Death Rate* (CDR), yaitu jumlah kematian pada populasi per 1.000 individu dalam populasi pada tahun tertentu (Schatz, 2015 dalam Amalia, 2016).

## ***I. Ruang Terbuka Hijau***

### **1. Pengertian dan Jenis RTH**

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan menjelaskan bahwa ruang terbuka hijau atau disebut dengan RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara ilmiah maupun yang sengaja ditanam. Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan kedalam RTH Privat dan RTH Publik. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Sedangkan RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Pembagian jenis-jenis RTH Publik dan Privat dapat diketahui melalui tabel berikut:

Tabel 1. Kepemilikan RTH

No	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1	2	3	4
1	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		✓

No	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
	b. Halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha		✓
	c. Taman atap bangunan		✓
2	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	✓	✓
	b. Taman RW	✓	✓
	c. Taman Kelurahan	✓	✓
	d. Taman Kecamatan	✓	✓
	e. Taman Kota	✓	
	f. Hutan Kota	✓	
	g. Sabuk hijau (green belt)	✓	
3	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	✓	✓
	b. Jalur pejalan kaki	✓	✓
	c. Ruang dibawah jalan layang	✓	
4	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH sempadan rel kereta api	✓	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	✓	
	c. RTH sempadan sungai	✓	
	d. RTH sempadan pantai	✓	
	e. RTH pengamanan sumber air baku/mata air	✓	
	f. Pemakaman	✓	

Sumber : PP No.5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka

Hijau di Kawasan Perkotaan

## 2. *RTH Pemakaman*

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan menjelaskan bahwa penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan. Untuk penyediaan RTH pemakaman, maka ketentuan bentuk pemakaman adalah sebagai berikut:

- a. ukuran makam 1 m x 2 m;
- b. jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;
- c. tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/ perkerasan;
- d. pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
- e. batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya;
- f. batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung;
- g. ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya.

Pemakaman memiliki fungsi utama sebagai tempat pelayanan publik untuk penguburan jenazah. Pemakaman juga dapat berfungsi sebagai RTH



untuk menambah keindahan kota, daerah resapan air, pelindung, pendukung ekosistem, dan pemersatu ruang kota, sehingga keberadaan RTH yang tertata di kompleks pemakaman dapat menghilangkan kesan seram pada wilayah tersebut.

#### ***J. Pengertian Pemakaman***

Makam menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu tempat untuk memakamkan jenazah atau lubang dalam tanah yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan atau menguburkan orang yang telah meninggal. Sedangkan menurut Islam dan pengertian luasnya, makam merupakan tempat peristirahatan bagi orang yang telah meninggal sampai ia nanti akan dibangkitkan kembali. Dibangkitkan untuk menghadap pengadilan Allah dalam menimbang setiap amalan yang telah dilakukan semasa hidupnya di dunia, baik itu amal baik maupun amal buruk (Zuliyanto, 2015).

Kata makam berarti kuburan. Kata kuburuan berasal dari kata dasar kubur, berasal dari bahasa Arab yang berarti memendam, memasukkan, melupakan, mengebumikan. Kata makam juga berarti tempat, tempat tinggal, dan kediaman. Kubur, dari bahasa Arab adalah kata kerja (verbal) yang berarti menanam atau memendam sesuatu, biasanya jenazah seseorang atau bangkai hewan di dalam tanah. Kuburan atau pekuburan adalah tempat dimana jenazah-jenazah dikubur juga disebut pemakaman (Adhyaksa, 2017).

Pemakaman menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Makassar adalah memasukkan jenazah kedalam suatu liang lahad atau mengebumikan pada

tempat pemakaman yang telah disiapkan oleh pemerintah kota atau orang pribadi, badan hukum perdata dan badan lainnya. Adapun untuk tempat pemakaman umum merupakan areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa, dimana areal tanah tersebut disediakan untuk pemakaman jenazah bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan agama, bangsa atau kewarganegaraannya. Bagi jenazah yang tidak jelas identitasnya maupun agamanya, penguburannya ditempatkan dalam lingkungan tertentu di tempat pemakaman umum tersebut. Pengaturan atas tempat pemakaman umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah dan sesuai dengan rencana pembangunan daerah serta sesuai adat istiadat masyarakat setempat (Aji, Suprayogi, & Wijaya, 2015).

Kajian teori tentang pemakaman menurut Sofian (2015) memiliki beberapa bagian yang ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

1. **Sosiologi** : pemakaman diperlukan sebagai perwujudan penghormatan terakhir untuk almarhumah dan bentuk partisipasi serta kepedulian relasi.
2. **Psikologis** : secara psikologis pemakaman diperlukan untuk memberikan kenangan serta dukungan moral bagi keluarga yang ditinggalkan, dukungan moral tersebut didapat melalui simpati dan partisipasi tamu yang datang.
3. **Kultural** : sejak dahulu sudah ada budaya upacara pemakaman, kembali kepada kebutuhan diadakannya upacara pemakaman, yaitu penghormatan terakhir dan memoriam untuk almarhumah.
4. **Antropologis** : pemakaman diperlukan dalam hubungan antar manusia karena untuk membuat relasi serta membuat memori.

## **K. Jenis Pemakaman**

Adapun untuk jenis pemakaman berdasarkan kepercayaan dan adat/budaya yang dianut masyarakat menurut Sofian (2015), antara lain adalah :

### **1. Pemakaman Katholik/ Kristen**

Pemakaman Katholik/Kristen sebelumnya disebut *Requeim Mass* (*liturgy*). Roma adalah asal muasal budaya ini, dan dimulai sejak 1176-1185 sesudah masehi. Disini juga dipopulerkan busana funeral berwarna hitam. *Eulogi* (pidato berisi pujian bagi orang yang baru meninggal dunia) adalah salah satu bagian di pemakaman Katholik.

### **2. Pemakaman Budhha**

Pemakaman Budhha ada karena kepercayaan mereka terhadap lingkaran kehidupan (*reinkarnasi*). Kematian bagi umat Budhha adalah hal kuat yang dilandasi ajaran Budhha. Ada beberapa *culture* dalam pemakaman Budhha, antara lain adalah Mataka-Vastra-Puja, menggunakan proses pembakaran jenazah serta membakarkan uang, pakaian serta kebutuhan jenazah. Mataka-bana proses pendoaan arwah sebelum arwah kedunia akhirat, dipercaya arwah akan menjenguk sanak saudaranya.

### **3. Pemakaman Islam**

Pemakaman Islam diprioritaskan kepada doa terhadap arwah dan penyatuan jenazah dengan tanah.

### **4. Pemakaman Hindu/Antyesti**

Pemakaman Hindu memiliki prosesi pemakaman yang memakan waktu cukup panjang. Sakraman antyesti yang merupakan proses dua penyucian, adalah upacara terakhir dari sebuah perjalanan hidup seorang manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman menjelaskan bahwa pengelolaan tanah tempat pemakaman di Indonesia dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu:

### **1. Tempat Pemakaman Umum**

Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa, dimana areal tanah tersebut disediakan untuk pemakaman jenazah bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan agama, bangsa atau kewarganegaraannya.

### **2. Tempat Pemakaman Bukan Umum**

Tempat Pemakaman Bukan Umum yang juga disebut Tempat Pemakaman Partikelir pengelolaannya dilakukan oleh swasta dan hanya dimungkinkan oleh suatu Badan Hukum/Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah.

### **3. Tempat Pemakaman Khusus**

Di samping Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum tersebut di atas, terdapat tempat-tempat pemakaman yang mempunyai nilai sejarah dan budaya seperti pemakaman para Wali (Makam Wali Songo), Raja-raja (Pemakaman Imegiri), tempat pemakaman para Pahlawan dan Pejuang Bangsa (Taman Makam Pahlawan) serta tempat pemakaman perang Belanda di tujuh kota sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1971.

#### **4. Krematorium**

Tempat pembakaran jenazah atau kerangka jenazah yang pelaksanaannya dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat ataupun Badan Hukum/Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### **5. Tempat Penyimpanan Jenazah**

Menurut adat yang masih berlaku di berbagai tempat di Indonesia, dikenal beberapa masyarakat hukum adat yang tidak mengubur jenazah di dalam tanah melainkan menyimpan jenazah di dalam lubang-lubang atau gua-gua ataupun menempatkan jenazah di tempat-tempat yang terbuka, yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain.

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini dibatasi hanya pada tempat pemakaman umum milik pemerintah yang ada di Kota Makassar yaitu TPU Islam/Muslim yang merupakan tempat pemakaman umum yang digunakan untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam. Kawasan pemakaman Islam yang diteliti yaitu TPU Islam Dadi, TPU Islam Beroanging, TPU Islam Paropo, TPU Islam Maccini dan TPU Islam Sudiang Raya.

#### ***L. Kebijakan Pengelolaan Pemakaman***

Secara eksplisit permasalahan penggunaan tanah telah diatur jelas di dalam UUD RI tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Melihat bunyi dari Pasal 33 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dapat dihubungkan bahwa semua masyarakat memiliki hak yang sama dalam penggunaan kekayaan alam tersebut khususnya penggunaan tanah untuk pemakaman. Kesamaan hak dalam mendapatkan tempat pemakaman umum diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman yang mengatur bahwa :

1. Setiap orang mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum.
2. Untuk ketertiban dan keteraturan Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum diadakan pengelompokan tempat, bagi masing-masing pemeluk agama.
3. Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang, baik pada pemakaman jenazah di Tempat Pemakaman Umum maupun di Tempat Pemakaman Bukan Umum ditetapkan tidak lebih dari  $2\frac{1}{2}$  (dua setengah ) meter x  $1\frac{1}{2}$  (satu setengah) meter dengan kedalaman minimum  $1\frac{1}{2}$  (satu setengah) meter.

Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah dan/atau Rencana Tata Kota, dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1987 Pasal 2 ayat 3 yaitu :

1. Tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya.
2. Menghindari penggunaan tanah yang subur.
3. Memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup.
4. Mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup.
5. Mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.



Sementara itu dalam hal Pengelolaannya, Tempat pemakaman di Indonesia lebih jelasnya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 yakni pengelolaan Tempat Pemakaman Umum yang terletak di Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Makassar menjelaskan mengenai pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagai berikut :

1. Pemerintah kota menyiapkan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat bagi penduduk kota maupun penduduk luar kota
2. Pelayanan yang dimaksud meliputi :
  - a. Pengangkutan jenazah,
  - b. Pemakaman/pengabuan
  - c. Penggalian makam dan pemindahan mayat
  - d. Pemugaran makam

Ketentuan perizinan lahan pemakaman di Kota Makassar juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Makassar pada pasal 11 sebagai berikut:

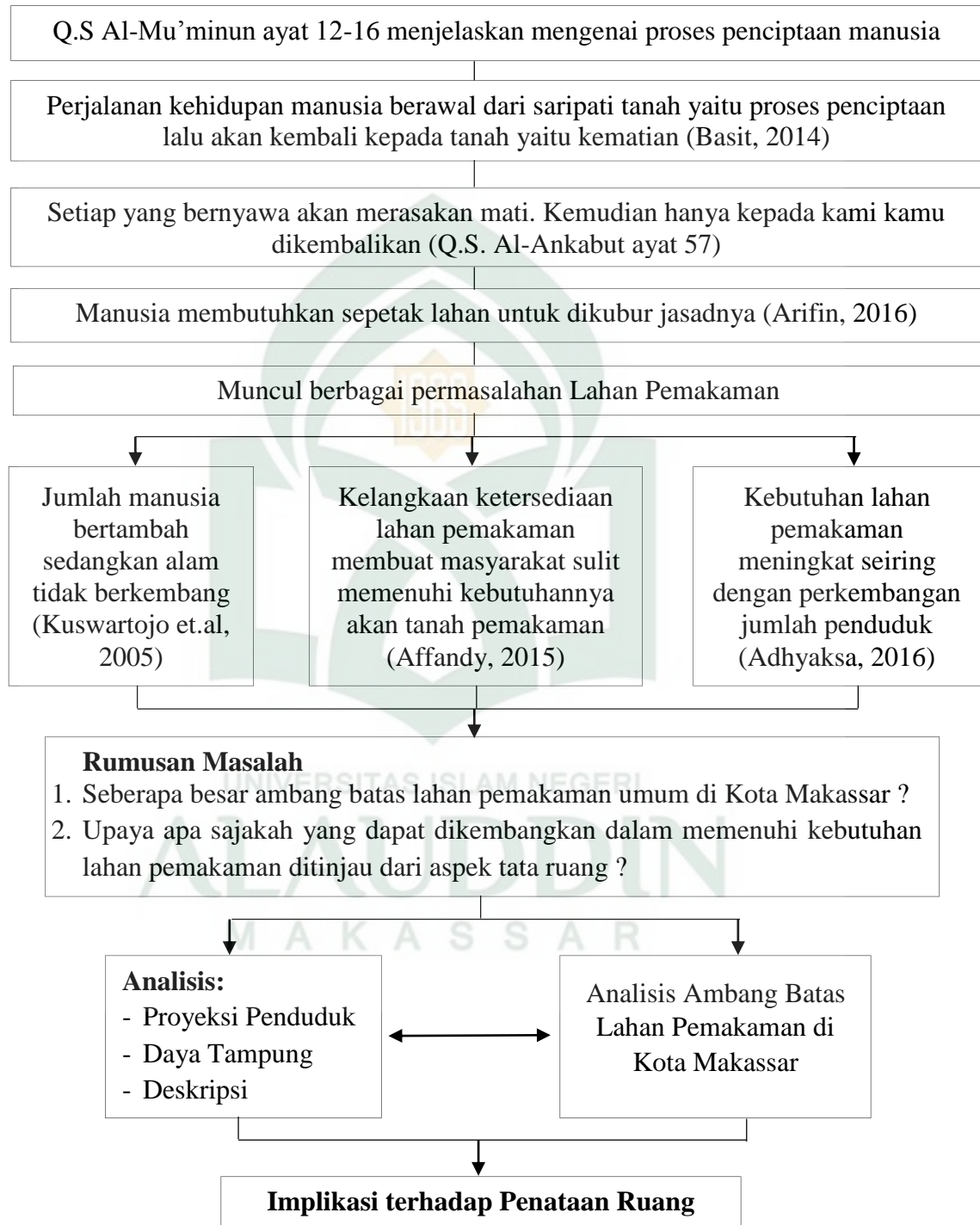
1. Setiap makam diberi tanda berupa nisan atau semacamnya dengan sistem dan penomoran sesuai yang ditetapkan SKPD,
2. Penomoran dimaksud harus sama dengan nomor urut pada buku register yang ada pada SKPD

3. Buku register sebagaimana yang dimaksud memuat :
  - a. Tanggal dan lokasi pemakaman jenazah
  - b. Nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama/kepercayaan dan domisili terakhir, tangga dan tempat meninggal dunia, penyebab kematiannya, besarnya retribusi serta nama dan domisili ahli waris.
4. Setiap makam disediakan tempat dengan ukuran maksimal panjang 2 (dua) meter, lebar 1 (satu) meter dan dalam minimal 1 (satu) meter.

Larangan yang terkait dalam pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Makassar juga dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 pada Bab VIII pasal 13 bahwa Setiap orang/penduduk dilarang :

1. Melakukan pemakaman jenazah tidak pada tempat yang ditentukan
2. Menggali makam dan memindahkan jenazah tanpa izin tertulis dari SKPD
3. Menyimpan mayat lebih dari satu kali dua puluh empat jam, kecuali ditentukan lain oleh SKPD
4. Syarat dan tata cara menyimpan mayat sebagaimana yang dimaksud pada poin ketiga yang diatur lebih lanjut oleh SKPD.

### *M. Kerangka Pikir Penelitian*



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### ***A. Lokasi dan Waktu Penelitian***

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan fokus penelitian pada lahan pemakaman umum Islam kota Makassar milik pemerintah yang saat ini terdapat 5 tempat pemakaman umum atau TPU diantaranya TPU Islam Dadi, TPU Islam Beroanging, TPU Islam Paropo, TPU Islam Maccini dan TPU Islam Sudiang Raya. Waktu penelitian ini dilakukan selama lima bulan yaitu pada bulan Maret sampai bulan Juli 2018.

### ***B. Jenis dan Sumber Data***

#### ***1. Jenis Data***

Jenis data yang dipergunakan berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian adalah data kuantitatif yang berupa angka atau nilai. Jenis data yang dimaksud adalah tata guna lahan, luas dan lokasi lahan pemakaman umum Islam milik pemerintah serta jumlah penduduk.

#### ***2. Sumber Data***

Data yang diperoleh kaitannya dengan penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Adapun untuk data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung dilapangan sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui instansi-instansi yang terkait seperti Dinas Kependudukan & Catatan Sipil, Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pusat Statistik.

### ***C. Metode Pengumpulan Data***

Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Observasi, berfungsi untuk pencarian data dengan mengidentifikasi data melalui pengukuran serta pengambilan data secara langsung kelapangan. Kegiatan observasi dilakukan secara sistematis untuk menjajaki masalah dalam penelitian serta bersifat eksplorasi. Observasi dilakukan berupa pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap kondisi eksisting lahan pemakaman umum Islam dengan melakukan sketsa dan pemetaan tematik lokasi.
2. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi tentang jumlah jenazah yang dimakamkan didalam maupun diluar Kota Makassar. Wawancara dilakukan terhadap supir mobil jenazah.
3. Metode instansional, yaitu salah satu teknik pengumpulan data melalui instansi terkait guna mengetahui data kuantitatif dan kualitatif objek penelitian.
4. Kepustakaan (*library research*) adalah cara pengumpulan data dan informasi melalui literatur/referensi, laporan penelitian serupa, dan bahan seminar atau jurnal yang terkait dengan studi yang akan dilakukan.
5. Studi dokumentasi, untuk melengkapi data maka diperlukan informasi dari dokumentasi yang berhubungan dengan objek yang menjadi studi.

### ***D. Variabel Penelitian***

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sudaryono, 2017). Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Tempat Pemakaman Umum Islam
2. Pertumbuhan Penduduk
3. Jumlah Penduduk Agama
4. Angka Kematian (Mortalitas)
5. Penguburan di dalam maupun di luar Kota Makassar

#### ***E. Metode Pengolahan dan Analisis Data***

Dalam metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Nanang Martono (2015) dalam Sudaryono (2017) penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif yaitu sebuah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena atau gejala sosial secara kuantitatif atau menganalisis bagaimana fenomena atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat saling berhubungan satu sama lain.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka teknik analisis yang digunakan adalah :

##### **1. Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif merupakan suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Tujuan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-



fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki sehingga yang sangat perlu adalah kekuatan data.

## 2. Analisis Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk bukan merupakan ramalan jumlah penduduk di masa mendatang, tetapi merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi tertentu dari variabel pertumbuhan penduduk yakni kelahiran, kematian dan migrasi. Ketiga komponen variabel inilah yang menentukan besarnya penduduk dan karakteristiknya di masa mendatang (Mantra, 2000 *dalam* Muta'ali, 2015).

Untuk menghitung pertumbuhan penduduk dan proyeksi penduduk di Kota Makassar maka digunakan Metode Extrapolasi yang menurut Tarigan (2012), merupakan kecenderungan pertumbuhan penduduk di masa lalu dan melanjutkan kecenderungan tersebut untuk masa yang akan datang sebagai proyeksi. Rumus proyeksi tersebut adalah :

$$P_t = P_o + f(t-o)$$

Keterangan : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

$P_t$  = penduduk pada tahun  $t$

$P_o$  = penduduk pada tahun dasar

$(t-o)$  = selisih antara tahun dasar dengan tahun yang diramalkan, yang sering disingkat dengan  $n$

$f$  = fungsi perkembangan penduduk

Apabila trend masa lalu mendekati garis lurus maka  $f(t-o)$  berubah menjadi  $b(t-o)$  dan rumus keseluruhan menjadi

$$P_t = P_o + b(t-o)$$

dimana :

b = rata-rata tambahan jumlah penduduk tiap tahun pada masa lampau sampai sekarang (tahun dasar proyeksi)

Apabila trend masa lalu adalah garis lengkung yang menaik, rumusnya berubah menjadi

$$P_t = P_o (1+r)^{(t-o)}$$

dimana :

r = rata-rata proporsi kenaikan penduduk setiap tahun, yaitu jumlah kenaikan/pertambahan penduduk dibagi jumlah penduduk pada tahun dasar (tahun sebelumnya). Rumus tersebut sering disingkat menjadi

$$P_t = P_o (1+r)^n$$

### 3. Analisis Daya Tampung sebagai Ambang Batas Lahan Pemakaman

Analisis daya tampung dijadikan sebagai analisis untuk mengetahui ambang batas lahan pemakaman di Kota Makassar dengan menghitung luasan fungsi lahan pemakaman yang akan dibagi dengan luasan setiap makam sesuai dengan rumus yang dikemukakan oleh Yaeates (1980) dalam Muta'ali (2012) sebagai berikut :

$$A = L / P$$

Keterangan :

A = Daya Tampung Lahan

L = Luas Lahan (Ha)

P = Luasan Makam (Ha)

#### ***F. Definisi Operasional***

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Dalam definisi operasional ini ada beberapa pengertian dan batasan yang berkaitan dengan pokok pembahasan materi penelitian untuk dijadikan acuan yaitu :

1. Lahan Pemakaman umum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lahan pemakaman umum Islam milik pemerintah Kota Makassar yang terdapat di 5 tempat yakni TPU Islam Dadi, TPU Islam Beroanging, TPU Islam Paropo, TPU Islam Macini dan TPU Islam Sudiang Raya.
2. Ambang batas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah batas kemampuan lahan pemakaman untuk menampung mayat.
3. Penduduk berdasarkan penguburan dalam penelitian ini adalah jumlah jenazah yang dimakamkan baik di dalam maupun di luar Kota Makassar.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Wilayah Kota Makassar***

Sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar terletak di ujung selatan Pulau Sulawesi dengan cakupan wilayah merupakan wilayah pesisir dan bahkan mempunyai 5 pulau dimana terdapat di kelurahan yang berada di pulau. Selain itu, Kota Makassar juga merupakan dataran rendah dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter di atas permukaan laut.

##### **1. Letak Geografis dan Administrasi**

Secara astronomis, Kota Makassar terletak antara 119°24'17"28" Bujur Timur dan 5°8'6"19" Lintang Selatan sedangkan berdasarkan posisi geografisnya, Kota Makassar memiliki batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan dan terbagi dalam 153 kelurahan, 996 RW dan 4.964 RT dengan Kecamatan Tallo merupakan kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak yakni 15 kelurahan sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan tersedikit terdapat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebanyak 3 kelurahan. Adapun untuk

jumlah RW terbanyak terdapat di Kecamatan Kecamatan Tamalate sebanyak 113 sedangkan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan jumlah 15 RW dan untuk kecamatan dengan jumlah RT terbanyak terdapat di Kecamatan Rappocini sebanyak 573 RT dan yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan jumlah 57 RT. Namun, untuk lebih jelasnya mengenai jumlah Kelurahan, RW dan RT di Kota Makassar menurut Kecamatan dapat diketahui melalui tabel berikut :

Tabel 2. Pembagian Kelurahan, RW, dan RT Menurut Kecamatan di Kota Makassar, 2016

No	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
1	2	5	6	7
1	Mariso	9	47	213
2	Mamajang	13	56	280
3	Tamalate	11	113	565
4	Rappocini	11	107	573
5	Makassar	14	69	369
6	Ujung Pandang	10	37	139
7	Wajo	8	45	169
8	Bontoala	12	56	240
9	Ujung Tanah	9	35	143
10	Kep. Sangkarrang	3	15	57
11	Tallo	15	77	465
12	Panakkukang	11	90	475
13	Manggala	8	70	388
14	Biringkanaya	11	111	544
15	Tamalanrea	8	68	344
<b>Kota Makassar</b>		<b>153</b>	<b>996</b>	<b>4,964</b>

Sumber : BPS Kota Makassar dalam Angka Tahun 2017

## 2. Penggunaan Lahan di Kota Makassar

Jenis penggunaan lahan yang terdapat di Kota Makassar terdapat 28 jenis, adapun jenis penggunaan lahan dengan luas terbesar yakni permukiman dengan luas 8003.79 ha. Sedangkan jenis penggunaan lahan terkecil yaitu lahan kosong dengan luas 0.27 ha. untuk lebih jelasnya dapat diketahui melalui tabel berikut :

Tabel 3. Jenis Penggunaan Lahan di Kota Makassar Tahun 2018

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)
1	2	3
1	Benteng	8.99
2	Dermaga	6.18
3	Genangan	75.85
4	Industri	667.02
5	Kawasan Olah Raga	33.27
6	Kawasan Pelabuhan	63.95
7	Kebun	913.64
8	Kolam	2.07
9	Komersial	49.21
10	Ladang	15.33
11	Lahan Kosong	0.27
12	Lapangan	80.44
13	Makam	66.7
14	Mangrove	357.39
15	Militer	74.43
16	Olah Raga	5.39
17	Pelabuhan	13.45
18	Pemerintahan	22.97
19	Pendidikan	247.37
20	Permukiman	8,003.79
21	Rawa	143.77
22	Sawah	2.659,36
23	Semak	102,69
24	Sirkuit	4,03



No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)
1	2	3
25	Taman	4,03
26	Tambak	2,401.70
27	Pemukaman	28.138
28	Tanah Kosong	1,553.15
<b>Total</b>		<b>17,045.138</b>

Sumber : Hasil Olah data Arcgis, 2018

### 3. Aspek Kependudukan di Kota Makassar

Penduduk Kota Makassar berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menunjukkan bahwa jumlah penduduk untuk 5 tahun terakhir ini yakni dari tahun 2013-2017 meningkat setiap tahunnya. Data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dibandingkan perempuan dengan selisih 7.296 jiwa.

#### a. Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

Jumlah penduduk di Kota Makassar untuk setiap tahunnya semakin meningkat seperti yang tercatat data jumlah penduduk dari tahun 2013-2017 menunjukkan peningkatan yakni di tahun 2014 sebesar 1.652.305 jiwa hingga di tahun 2017 sebesar 1.668.314 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai data perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2013-2017 menurut kecamatan dapat diketahui melalui tabel dan grafik berikut :

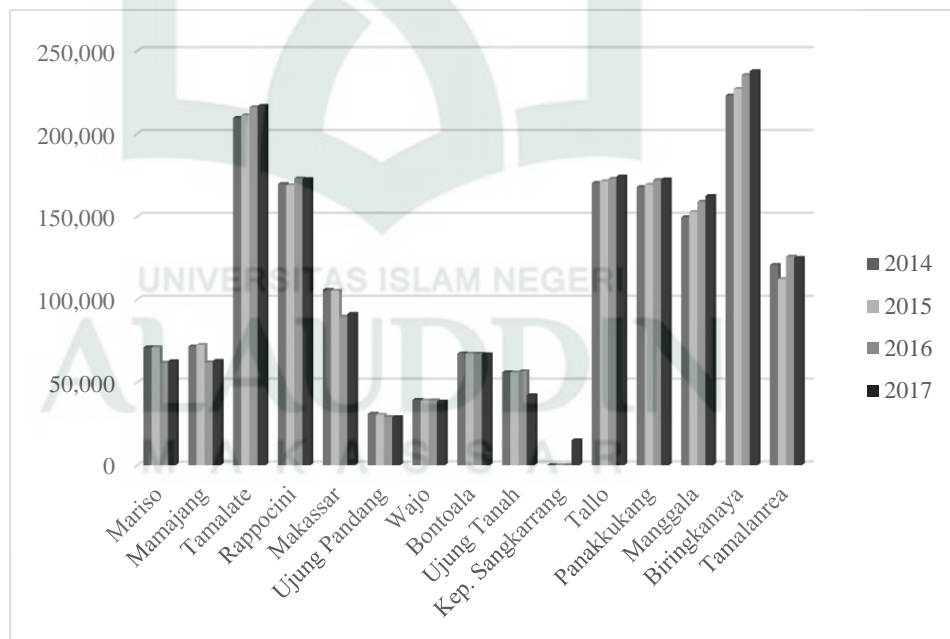
Tabel 4. Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Makassar dari

Tahun 2014-2017 Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Tahun (jiwa)			
		2014	2015	2016	2017
1	2	4	5	6	7
1	Mariso	71,039	71,096	61,762	62,624
2	Mamajang	71,570	72,543	61,967	62,852
3	Tamalate	209,506	211,045	215,880	216,699

No	Kecamatan	Tahun (jiwa)			
		2014	2015	2016	2017
4	Rappocini	169,603	168,843	172,947	172,508
5	Makassar	105,725	105,128	89,558	91,224
6	Ujung Pandang	30,982	30,338	28,943	28,845
7	Wajo	39,350	38,937	39,010	38,338
8	Bontoala	67,332	67,295	67,170	66,806
9	Ujung Tanah	55,935	55,878	56,588	42,121
10	Kep. Sangkarrang	0	0	0	14,950
11	Tallo	170,257	171,284	172,703	174,048
12	Panakkukang	167,759	169,118	171,960	172,332
13	Manggala	149,552	152,687	158,889	162,347
14	Biringkanaya	222,969	226,936	235,364	237,646
15	Tamalanrea	120,726	112,258	125,762	124,974
<b>Kota Makassar</b>		<b>1,652,305</b>	<b>1,653,386</b>	<b>1,658,503</b>	<b>1,668,314</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, 2018



Gambar 2. Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Makassar dari  
Tahun 2014-2017 Menurut Kecamatan

### b. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelamin dilakukan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam satu wilayah tertentu. Adanya ketidakseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan (rasio jenis kelamin) dapat mengakibatkan rendahnya fertilitas dan rendahnya angka pertumbuhan penduduk.

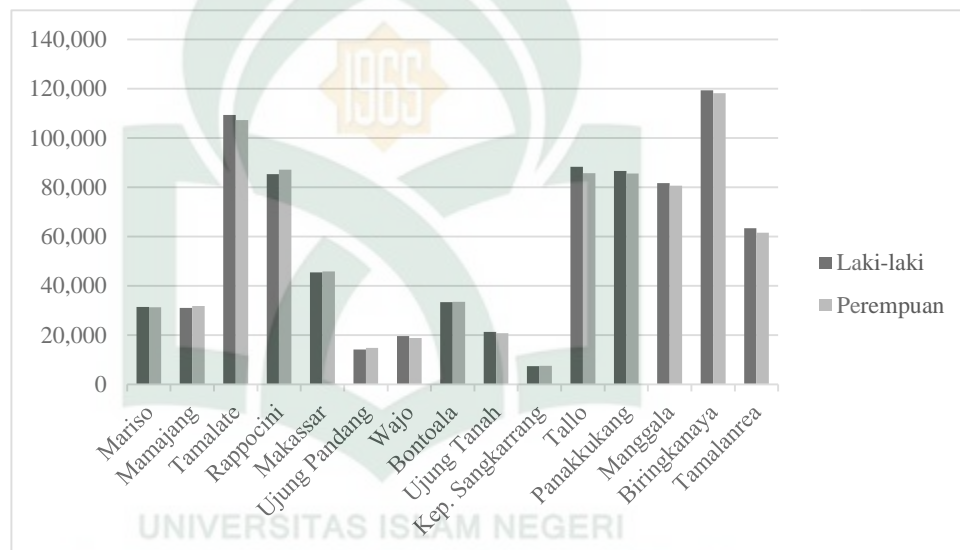
Kota Makassar memiliki jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki selama 5 tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Makassar dapat diketahui melalui tabel berikut :

Tabel 5. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di  
Kota Makassar Tahun 2017

No	Kecamatan	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	2	3	4	5
1	Mariso	31,374	31,250	62,624
2	Mamajang	30,995	31,857	62,852
3	Tamalate	109,393	107,306	216,699
4	Rappocini	85,382	87,126	172,508
5	Makassar	45,385	45,839	91,224
6	Ujung Pandang	14,079	14,766	28,845
7	Wajo	19,537	18,801	38,338
8	Bontoala	33,303	33,503	66,806
9	Ujung Tanah	21,333	20,788	42,121
10	Kep. Sangkarrang	7,424	7,526	14,950
11	Tallo	88,377	85,671	174,048
12	Panakkukang	86,687	85,645	172,332
13	Manggala	81,710	80,637	162,347

No	Kecamatan	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	2	3	4	5
14	Biringkanaya	119,457	118,189	237,646
15	Tamalanrea	63,369	61,605	124,974
<b>Kota Makassar</b>		<b>837,805</b>	<b>830,509</b>	<b>1,668,314</b>
<b>2016</b>		<b>834,556</b>	<b>823,947</b>	<b>1,658,503</b>
<b>2015</b>		<b>830,437</b>	<b>822,949</b>	<b>1,653,386</b>
<b>2014</b>		<b>832,290</b>	<b>820,015</b>	<b>1,652,305</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, 2018



Gambar 3. Grafik Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Makassar

Tahun 2017

### c. Jumlah Penduduk Agama berdasarkan Kecamatan

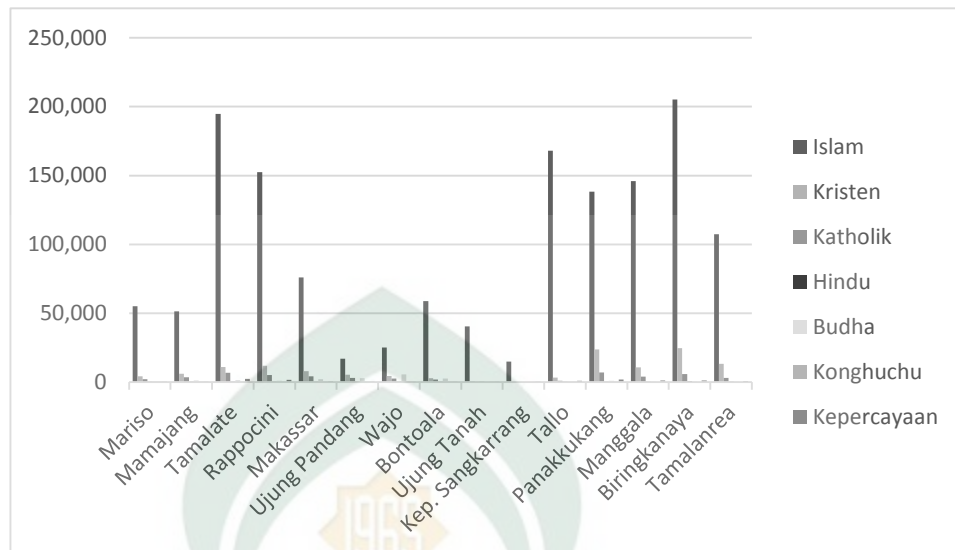
Masyarakat Indonesia memeluk agama dan kepercayaan yang beragama sehingga memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Negara memberikan kebebasan kepada semua penduduknya untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya.

Kota Makassar memiliki beranekaragam agama yang terdiri atas Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Konghuchu dan aliran Kepercayaan. Penduduk Kota Makassar lebih banyak berkeyakinan Islam yang terdapat di Kecamatan Biringkanaya sebanyak 205.191 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk agama berdasarkan kecamatan dapat diketahui melalui tabel berikut :

Tabel 6. Jumlah Penduduk Agama berdasarkan Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2017

No	Kecamatan	Agama (jiwa)							Jumlah (jiwa)
		Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghuchu	Kepercayaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mariso	55,070	4,379	2,120	79	644	1	331	62,624
2	Mamajang	51,312	6,233	3,526	144	1,239	5	423	62,852
3	Tamalate	194,601	11,080	6,833	261	1,564	4	2,356	216,699
4	Rappocini	152,550	11,968	5,132	195	943	2	1,718	172,508
5	Makassar	76,014	8,040	4,231	48	2,286	4	601	91,224
6	Ujung Pandang	17,142	5,429	3,170	50	2,833	14	207	28,845
7	Wajo	25,156	4,518	2,701	56	5,614	14	279	38,338
8	Bontoala	58,805	2,919	1,924	35	2,728	5	390	66,806
9	Ujung Tanah	40,596	706	278	13	368	4	156	42,121
10	Kep. Sangkarrang	14,891	16	0	0	0		43	14,950
11	Tallo	167,926	3,428	1,017	111	504	1	1,061	174,048
12	Panakkukang	138,287	23,866	6,984	231	1,091	1	1,872	172,332
13	Manggala	145,902	10,788	4,018	163	233	0	1,243	162,347
14	Biringkanaya	205,191	24,648	5,862	552	134	0	1,259	237,646
15	Tamalanrea	107,487	13,336	3,140	167	144	0	700	124,974
Kota Makassar		1,450,930	131,354	50,936	2,075	20,325	55	12,639	1,668,314
2016		1,436,921	132,202	50,652	2,108	2,0432	62	1,6126	1,658,503
2015		1,423,334	132,922	51,721	2,110	21,080	65	22,154	1,653,386
2014		1,416,090	133,204	51,525	2,158	21,481	68	27,779	1,652,305

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, 2018



Gambar 4. Grafik Jumlah Penduduk Agama berdasarkan Kecamatan di Kota Makassar  
Tahun 2017

#### d. Perkembangan Jumlah Kematian

Kematian atau sering disebut dengan mortalitas merupakan salah satu dari tiga komponen yang mempengaruhi struktur dan jumlah penduduk di suatu wilayah. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk suatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan barometer dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di daerah tersebut.

Perkembangan jumlah kematian di Kota Makassar selama tiga tahun terakhir ini semakin meningkat setiap tahunnya yakni di tahun 2015 sebanyak 3.251 jiwa kemudian meningkat di tahun 2016 menjadi 3.434 jiwa dan di tahun 2017 meningkat lagi menjadi 3.422 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan jumlah penduduk yang meninggal selama lima tahun terakhir dapat diketahui melalui tabel berikut:



Tabel 7. Perkembangan Jumlah Kematian di Kota Makassar dari

Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah Kematian (jiwa)
1	2	3
1	2013	3,252
2	2014	3,177
3	2015	3,251
4	2016	3,434
5	2017	3,422

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2018



Gambar 5. Grafik Perkembangan Jumlah Kematian di Kota Makassar Tahun 2016

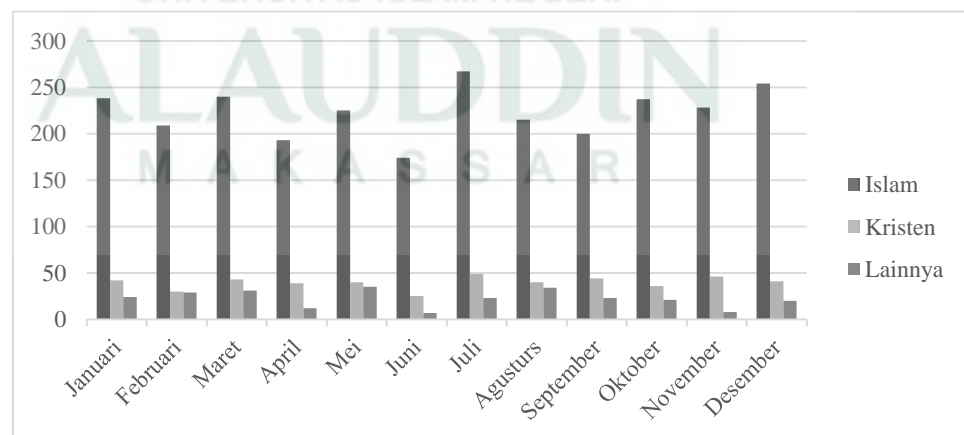
#### e. Jumlah Kematian Menurut Agama dan Bulan

Kota Makassar memiliki beberapa klasifikasi penduduk seperti berdasarkan jumlah kematian yang kemudian dibedakan lagi yakni salah satunya berdasarkan agama dan bulannya. Jumlah kematian terbanyak menurut agama terdapat di kelompok agama Islam sebanyak 2.680 jiwa dengan total kematian terbanyak terdapat di bulan Juli 2017 sebanyak 339 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah kematian menurut agama dan bulan di Kota Makassar dapat diketahui melalui tabel berikut :

Tabel 8. Jumlah Kematian Menurut Agama dan Bulan di  
Kota Makassar Tahun 2017

No	Bulan	Jumlah Kematian (jiwa)			Jumlah (jiwa)
		Islam	Kristen	Lainnya	
1	2	3	4	5	6
1	Januari	238	42	24	304
2	Februari	209	30	29	268
3	Maret	240	43	31	314
4	April	193	39	12	244
5	Mei	225	40	35	300
6	Juni	174	25	7	206
7	Juli	267	49	23	339
8	Agusturs	215	40	34	289
9	September	200	44	23	267
10	Oktober	237	36	21	294
11	November	228	46	8	282
12	Desember	254	41	20	315
Kota Makassar		2,680	475	267	3,422
2016		2,664	463	307	3,434
2015		2,638	402	211	3,251
2014		2,527	459	191	3,177
2013		2,569	473	210	3,252

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2018



Gambar 6. Grafik Jumlah Kematian Menurut Agama dan Bulan di Kota Makassar

Tahun 2017

**f. Jumlah Kematian Menurut Penguburan di dalam & di luar Kota Makassar**

Kematian adalah suatu kepastian yang akan terjadi pada setiap manusia, jika telah datang waktunya tak satu pun makhluk yang mampu menanggungkannya sehingga dimana pun seseorang berada dan dalam kondisi apapun jika ajal telah menjemputnya maka akan terjadi pula. Dalam suatu daerah, terdapat beberapa orang yang meninggal namun tidak dimakamkan dalam daerah tersebut seperti halnya di Kota Makassar yang beberapa dari masyarakatnya yang meninggal dimakamkan di kampungnya sendiri begitupun sebaliknya. Berikut jumlah kematian berdasarkan penguburan di dalam Kota Makassar dapat diketahui melalui tabel berikut:

Tabel 9. Jumlah Kematian Menurut Penguburan di Kota Makassar

Tahun 2017

No	Bulan	Jumlah (jiwa)
1	2	3
1	Januari	1
2	Februari	1
3	Maret	8
4	April	4
5	Mei	8
6	Juni	5
7	Juli	6
8	Agusturs	2
9	September	4
10	Oktober	8
11	November	4
12	Desember	16
<b>Kota Makassar</b>		<b>67</b>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2018

Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terkhususnya bagian UPTD Pemakaman memiliki data jumlah kematian yang hanya berdasarkan masyarakat yang dimakamkan di Kota Makassar baik yang berdomisili Makassar maupun dari luar daerah. Sehingga untuk data jumlah kematian Kota Makassar yang dimakamkan di luar daerah diperoleh melalui hasil wawancara dengan beberapa perusahaan yang menerima pelayanan jasa pengantaran jenazah.

Jumlah kematian penduduk Kota Makassar yang dimakamkan diluar daerah yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa perusahaan jasa pengantaran jenazah menginformasikan bahwa jumlah jenazah yang mereka antar keluar daerah perbulannya  $\pm 25$  jenazah sehingga dalam setahunnya diperkirakan terdapat  $\pm 300$  jenazah dalam satu perusahaan. Jumlah perusahaan jasa pengantaran jenazah yang didapatkan melalui wawancara sebanyak 10 perusahaan yakni Ambulance Inti Makassar, CV. Ambulance Daya Makassar, Ambulance Toa Daeng 3, Pekat Ambulance Service, Persada Utama Makassar Ambulance, Ambulance KKS, Ambulance MH Daya Persada, Ambulance Rezky, Ambulance Borong dan Ambulance Parangpuang.

Menghitung jumlah kematian yang dimakamkan diluar Kota Makassar dengan asumsi  $\pm 300$  jenazah untuk setiap perusahaannya maka diperoleh  $\pm 3,000$  jenazah per tahunnya yang dimakamkan diluar Kota Makassar sehingga rata-rata total kematian penduduk per tahunnya di Kota Makassar baik yang dimakamkan di dalam dan di luar sebanyak 6.224 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat diketahui melalui tabel dan grafik berikut :

Tabel 10. Jumlah Kematian Menurut Penguburan di dalam dan di luar  
Kota Makassar yang beragama Islam Tahun 2017

No	Penguburan	Jumlah (jiwa)
1	2	3
1	Didalam Kota	2,680
2	Diluar Kota Makassar	3,000
<b>Kota Makassar</b>		<b>5,680</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2018

#### ***B. Perbandingan Persentase Pertumbuhan Jumlah Penduduk dengan Kematian***

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk baik penambahan maupun penurunannya. Istilah lain yang sering disamakan dengan pertumbuhan penduduk yaitu penambahan penduduk. Perbedaannya adalah untuk penambahan penduduk besarannya dinyatakan dengan angka tertentu sedangkan pertumbuhan penduduk dinyatakan dalam persen.

Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Makassar menunjukkan persentase pertumbuhannya meningkat dari tahun 2013-2017 dengan pertumbuhan penduduknya rata-rata hanya 0,32% yakni sebanyak 5.336 jiwa sedangkan persentase pertumbuhan jumlah kematian di Kota Makassar juga meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 2,54% yakni sebanyak 82 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya dari jumlah penduduk sebanyak 5.336 jiwa terdapat kematian 82 jiwa/tahun. Untuk lebih jelasnya dapat diketahui melalui tabel dan grafik berikut :

Tabel 11. Perbandingan Persentase Pertumbuhan Jumlah Penduduk dengan

Jumlah Kematian di Kota Makassar

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertambahan (jiwa)	%	Jumlah Kematian (jiwa)	Pertambahan (jiwa)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2014	1,652,305	-	-	3,177	-	-
2	2015	1,653,386	1,081	0.07	3,251	74	2.33
3	2016	1,658,503	5,117	0.31	3,434	183	5.63
4	2017	1,668,314	9,811	0.59	3,422	-12	-0.35
<b>Jumlah</b>		<b>8,040,580</b>	<b>16,009</b>	<b>0.97</b>	<b>16,536</b>	<b>245</b>	<b>7.61</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>1,608,116</b>	<b>5,336</b>	<b>0.32</b>	<b>3,307</b>	<b>82</b>	<b>2.54</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2018

### C. Identifikasi Tempat Pemakaman Umum Islam

Kota Makassar memiliki 5 lokasi pemakaman yakni TPU Islam Dadi, Islam Beroanging, Islam Paropo, Islam Maccini dan Islam Sudiang Raya dengan kondisi lokasi TPU yang masing-masing berbeda. Adapun penjelasan mengenai kondisi setiap TPU berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui melalui penjelasan berikut:

#### 1. TPU Islam Dadi

Pemakaman Islam Dadi terdapat di Kelurahan Maricayya Selatan, Kecamatan Mamajang yang dibuka sejak zaman belanda kemudian ditutup di tahun 1998 dengan luas lahan 33.148 m<sup>2</sup>. Penutupan TPU Islam Dadi dilakukan karena pemakaman TPU Islam Sudiang Raya saat itu telah dibuka dan apabila pemakaman-pemakaman didalam kota seperti TPU Islam Dadi tidak ditutup maka masyarakat akan tetap memilih menguburkan keluarga mereka di TPU dalam Kota dibandingkan di TPU Sudiang Raya karena lokasi yang jauh.



Pada tanggal 12 Desember 2005, pemerintah menyatakan bahwa TPU Islam Dadi dibuka kembali dengan sistem penumpukan makam bagi mereka yang mempunyai keluarga dalam TPU tersebut. Orang-orang yang telah dimakamkan dalam TPU ini terdapat dari beberapa daerah seperti dari Jawa, Madura, Enrekang, Maros, Bone, dan Selayar namun kebanyakan berasal dari Makassar. Dipemakaman ini terdapat 7 blok yakni dari A-G bertujuan untuk memudahkan mencari makam. Untuk setiap blok dirata-ratakan memiliki jumlah makam 2.500 petak sehingga total makam dalam TPU ini 17.500 petak.



Gambar 7. TPU Islam Dadi

## 2. TPU Islam Beroanging

Pemakaman Islam Beroanging memiliki luas lahan 45.974 m<sup>2</sup> yang terdapat di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo yang dibuka sejak zaman Belanda. Kemudian ditahun 1996 ditutup karena telah penuh dan dibuka kembali ditahun 2005 dengan sistem penumpukan makam bagi mereka yang memiliki keluarga yang terdapat dalam TPU tersebut. Orang-orang yang telah dimakamkan dalam TPU ini terdapat dari beberapa daerah seperti Jawa, Gowa, dan lain-lain namun kebanyakan berasal dari Kota Makassar.

Pemakaman di TPU Islam Beroanging dibagi per blok dengan jumlah 10 blok yakni dari A-J bertujuan untuk memudahkan mencari makam. Untuk setiap blok dirata-ratakan memiliki jumlah makam 3.000 petak sehingga total makam dalam TPU ini 30.000 petak.



Gambar 8. TPU Islam Beroanging

### 3. TPU Islam Paropo

Pemakaman Islam Paropo memiliki luas lahan 58.500 m<sup>2</sup> yang terdapat di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang dan dibuka sejak tahun 1958 hingga tahun 1985 telah penuh. Namun karena permintaan masyarakat di tahun 1985-1998 ingin menumpuk antar keluarga mereka sehingga dibuka kembali dengan sistem tumpuk. Akan tetapi di bulan oktober 1998 ditutup kembali kecuali untuk dua orang yakni Andi Muhammad Jusuf Amir yang dikenal dengan Jenderal M.Yusuf (Panglima Para Prajurit) dan A.A. Rifai (Mantan Gubernur Pertama Sulawesi Selatan) berdasarkan SK.

Banyaknya keluhan masyarakat seperti mahalnya biaya pemakaman di pihak swasta dan biaya memulangkan mayat ke kampung halaman menyebabkan TPU ini kembali dibuka di tahun 2005 hingga sekarang dengan

sistem tumpuk bagi yang memiliki hubungan keluarga dalam TPU tersebut. Orang-orang yang telah dimakamkan dalam TPU ini terdapat dari beberapa daerah seperti Jawa, Manado, Gorontalo dan hampir untuk semua kabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, namun TPU ini tetap diprioritaskan untuk masyarakat di Kota Makassar. TPU Islam Beroanging dibagi per blok dengan jumlah 17 blok yakni terdapat blok LL, D, E, K, Z, AB, DD, BB, AAC, X, AAB, V, T, J, P, N, dan M dengan setiap blok dirata-ratakan memiliki jumlah makam 476 petak sehingga total makam dalam TPU ini 8.092 petak.



Gambar 9. TPU Islam Paropo

#### 4. TPU Islam Maccini

Pemakaman Islam Maccini terdapat di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar dengan luas lahan sebesar 18.758 m<sup>2</sup> yang dibuka sejak zaman belanda kemudian ditutup ditahun 1976 karena telah penuh. Hingga saat ini, TPU Islam Maccini belum dibuka karena masih dalam keadaan pemeliharaan tetapi direncanakan akan dibuka di tahun 2019 nanti. Kondisi pemakaman dalam TPU ini tidak terawat, berair dan kotor dan jumlah petak diperkirakan



telah mencapai ribuan dengan kondisi setiap makam telah dilakukan penumpukan.



Gambar 10. TPU Islam Maccini

## 5. TPU Islam Sudiang Raya

Pemakaman Islam Dadi memiliki 125.000 m<sup>2</sup> yang terdapat di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya dan dibuka pada tanggal 6 bulan juni tahun 1996 dan masih aktif saat ini. Pemakaman ini merupakan makam baru namun terdapat juga beberapa makam yang telah ditumpuk.

Pemakaman di TPU Islam Dadi dibagi per blok dengan jumlah 54 blok yakni dari A-G sebanyak 26 blok, A1-A6 sebanyak 6 blok, C6-CC6 sebanyak 3 blok, AB-BB sebanyak 2 blok, AA-AQ sebanyak 17 blok sehingga total blok sebanyak 54 blok dengan rata-rata jumlah makam setiap blok terdapat 300 petak, dengan demikian total makam dalam TPU ini sebanyak 16.200 petak. Orang-orang yang telah dimakamkan dalam TPU kebanyakan adalah masyarakat yang domisili makassar namun ada pula yang dari luar kota seperti Maros.



Gambar 11. TPU Islam Sudiang Raya

#### ***D. Kondisi Tempat Pemakaman Umum Islam***

Tempat pemakaman umum Islam milik pemerintah adalah sarana yang disiapkan oleh pemerintah Kota Makassar untuk pemakaman kepada penduduk kota dan penduduk luar kota yang beragama Islam. Secara umumnya, Setiap makam disediakan tempat dengan ukuran maksimal panjang 2,5 meter, lebar 1,5 meter dan dengan kedalaman minimal 1,5 meter dari permukaan tanah namun kondisi di Kota Makassar menggunakan maksimal panjang 2 meter, lebar 1 meter dan minimal 1 meter.

Secara umumnya, kondisi tempat pemakaman umum Islam di Kota Makassar dapat ditinjau dari berbagai aspek :

##### **1. Luasan Lahan Makam**

Kota Makassar memiliki 5 TPU Islam milik pemerintah dengan total luas lahan sebanyak 281.382 m<sup>2</sup> atau 28,13 ha. Dari ke-5 lokasi TPU Islam tersebut terdapat 3 lokasi yang telah penuh yaitu TPU Islam Dadi, Beroanging dan Paropo tapi masih digunakan dengan sistem tumpuk sedangkan untuk TPU Islam Maccini juga telah penuh namun saat ini tidak digunakan karena berada dalam tahap pemeliharaan.

Lokasi pemakaman yang masih memiliki lahan kosong yaitu TPU Islam Sudiang Raya dengan sisa lahan sebanyak 0,93 ha. Meski terdapat lahan kosong tetapi dalam TPU ini juga terdapat makam yang ditumpuk yakni mereka yang merupakan pasangan suami istri.

## **2. Sistem Penumpukan**

Kurangnya lahan pemakaman untuk TPU Islam di Kota Makassar menyebabkan terjadinya sistem penumpukan mayat. Namun penumpukan ini dilakukan untuk mereka yang memiliki hubungan keluarga dengan selang waktu kematian minimal 5 tahun untuk dapat digali kembali sedangkan batasan maksimal mayat dalam satu makam tidak ada namun diperkirakan dalam satu makam hanya mampu menampung 3 mayat.

Hasil wawancara dengan para mandor dan pengawas di setiap TPU menjelaskan bahwa sistem tumpuk di lapangan terdapat 2 cara yang berbeda yakni :

### **a. Sistem Tumpuk Susun**

Sistem penumpukan ini dilakukan dengan cara menggali makam, kemudian mayat pertama yang tersisa tulang-belulangannya dipindahkan kebagian bawah dengan kedalaman  $\pm 50$  cm. Sedangkan bagi makam yang telah terdapat 2 mayat maka tulang belulang tersebut tetap dikumpul dan disatukan untuk dipindahkan kebagian bawah kemudian ditutup kembali sehingga dibagian atasnya akan diletakkan mayat yang baru dengan kedalaman  $\pm 1$  meter dari permukaan tanah setelah mayat yang lama.



b. Sistem Tumpuk Berdampingan

Sistem penumpukan ini dilakukan dengan cara membuat liang lahad dibagian sampingnya kemudian jika terdapat anggota keluarga yang ingin dimakamkan lagi maka makam tersebut dibongkar dan akan dibuat liang lahad lagi dibagian samping mayat sebelumnya sehingga tulang-belulang mayat sebelumnya tidak akan terganggu. Sistem ini juga berfungsi untuk menghindari longsor.

### 3. Pola Penataan Makam

Setiap TPU Islam memiliki pembagian perblok yang berguna untuk memudahkan ketika mencari makam. Dalam blok tersebut terdapat makam perempuan dan laki-laki yang dibedakan dengan bentuk nisannya yaitu untuk makam laki-laki terdapat 1 nisan sedangkan perempuan terdapat 2 nisan.



Ketidakteraturan makam terdapat di 4 lokasi TPU Islam seperti Dadi, Beroanging, Paropo dan Maccini yang disebabkan karena tidak adanya jarak antar makam, ukuran makam dan bentuk makam yang berbeda-beda. Sedangkan untuk TPU Islam Sudiang Raya masih terlihat teratur namun terdapat pula makam yang tidak memiliki jarak dengan makam lainnya disebabkan adanya renovasi makam seperti menembok sehingga luasan makam akan bertambah dengan mengambil lahan yang sebelumnya disediakan sebagai jarak antar makam.

### 4. Aktivitas di Makam




Aktivitas didalam TPU Islam Milik pemerintah tidak hanya terdapat makam tetapi juga terdapat aktivitas lain yang dilakukan oleh masyarakat sekitar TPU seperti menjemur pakaian di bagian pagar makam, tidur di atas makam yang telah

direnovasi, makan dan minum disekitaran makam, menidurkan bayi mereka diatas makam dengan membuat ayunan di atas makam yang memiliki pagar, berjualan didalam makam, tempat bermain anak-anak (main bola) dan tempat berkumpul masyarakat sekitar TPU. Berikut dokumentasi aktivitas yang terdapat didalam TPU:

Tabel 12. Dokumentasi Aktivitas di dalam setiap TPU Islam Milik Pemerintah Kota Makassar Tahun 2018

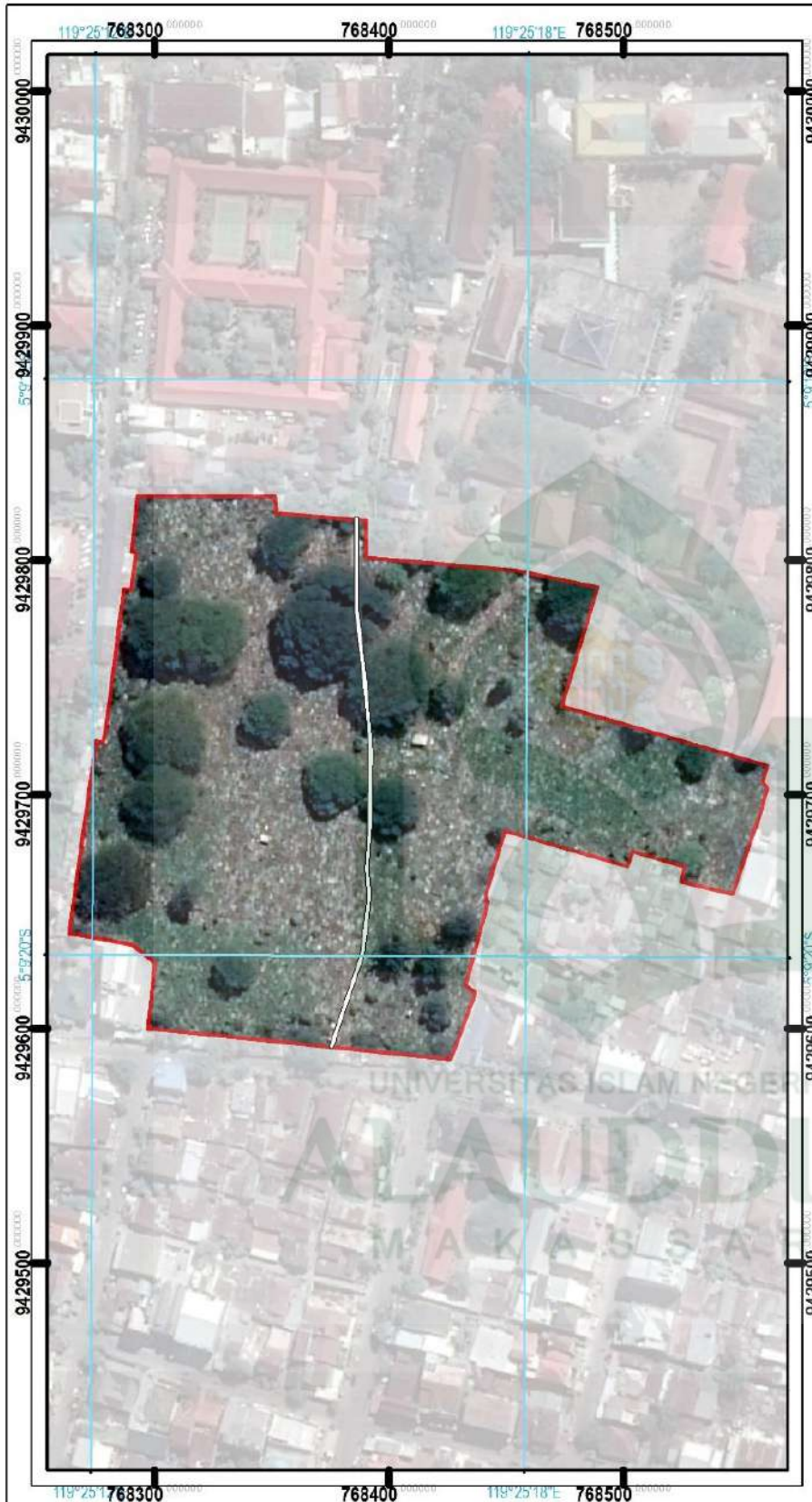
No	Aktivitas	Lokasi	Dokumentasi
1	Berjualan	TPU Islam Dadi	
2	Bermain	TPU Islam Beroanging	

No	Aktivitas	Lokasi	Dokumentasi
3	Menjemur Pakaian		
4	Makan	TPU Islam Paropo	
5	Tidur (Istirahat)		

No	Aktivitas	Lokasi	Dokumentasi
6	Menidurkan Anak		
7	Tempat berkumpul	TPU Islam Maccini	
8	Berjualan	TPU Islam Sudiang Raya	

Sumber : Hasil Survey Lapangan, 2018





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**  
**2018**

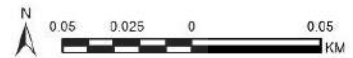
#### JUDUL SKRIPSI

Analisis Ambang Batas Leher Pemukiman  
 di Kota Makassar

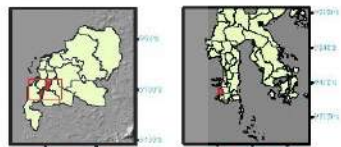
#### JUDUL GAMBAR

Peta Lokasi TPU Islam Dadi

SKALA 1: 2.500



KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM  
 Datum Horizontal : WGS 1984 Zona 50 S

#### KETERANGAN

— Jalan  
 — Delnasi Kawasan TPU Islam

#### MAHASISWA

Kartini  
 60800114072

#### DOSEN PEMBIMBING

1. Nur Syam AS, ST, M.Si  
 2. Fadlii Sunur, ST, M.Si

#### SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA

- Peta Rupabumi Indonesia Bakosurtanal Skala 1:50.000,  
 Bakosurtanal Tahun 2013  
 - RTRW Kota Makassar  
 - Citra Satelit Google Earth  
 - Survey Lapangan Tahun 2018

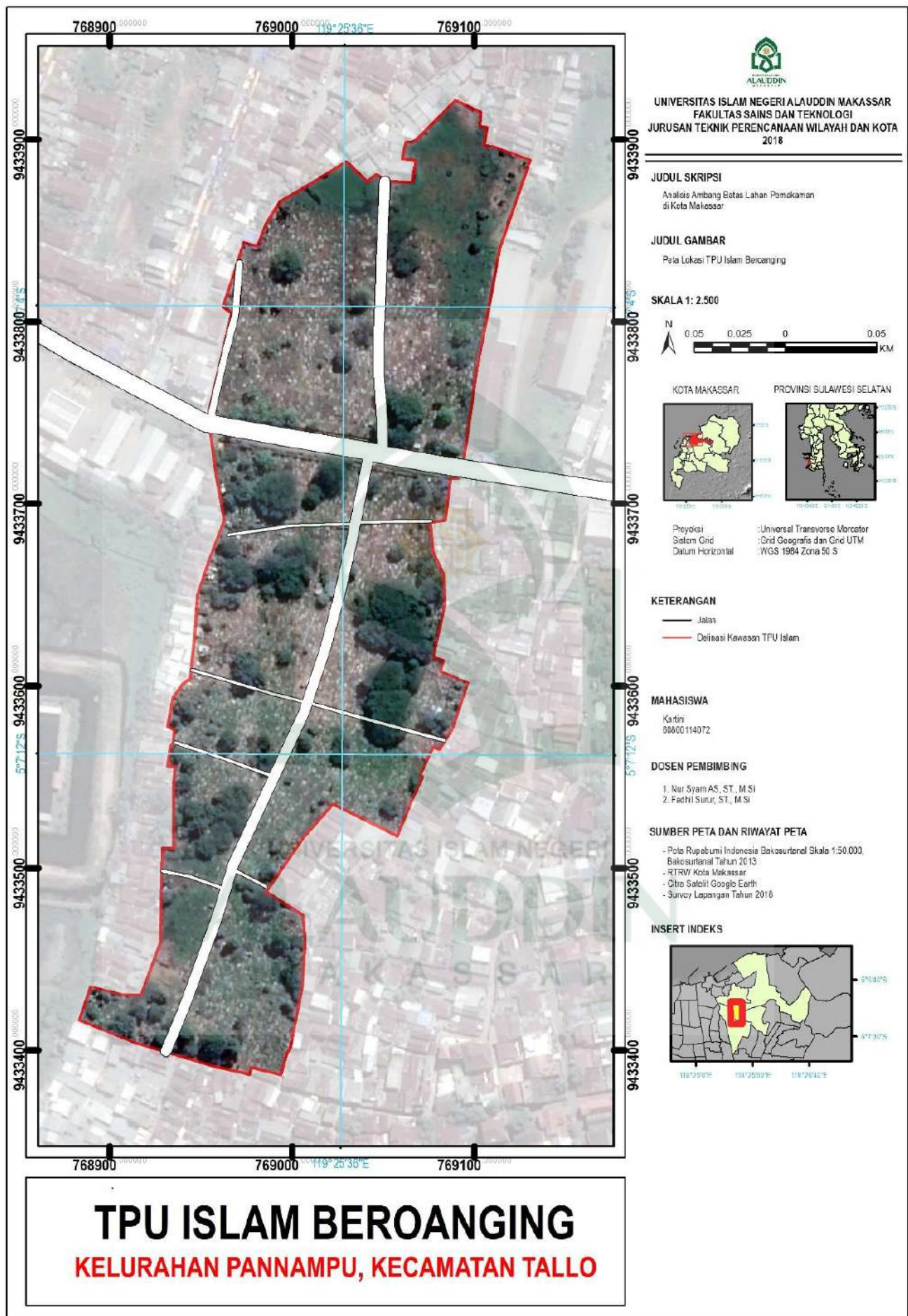
#### INSERT INDEKS



## TPU ISLAM DADI

KELURAHAN MARICAYA SELATAN, KECAMATAN MAMAJANG









UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
2018

**JUDUL SKRIPSI**

### Analisis Ambang Batas Lahan Pemukiman di Kota Makassar

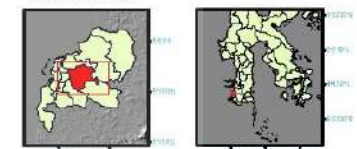
**JUDUL GAMBAR**

Peta Lokasi TPU Islam Paropo

SKALA 1: 2.500



KOTA MAKASSAR      PROVINSI SULAWESI SELATAN



Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal	: WGS 1984 Zona 50 S

**KETERANGAN**

— Jalan  
— Delinasi Kawasan TPU Islam

## MAHASISWA

Kartini  
60800114072**DOSEN PEMBIMBING**

1. Nur Syam AS, ST., M.Si
2. Fadhil Surur, ST., M.Si

#### SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA

- Peta Rupabumi Indonesia Bakosurtanal Skala 1:50.000, Bakosurtanal Tahun 2013
- RTRW Kota Makassar
- Citra Satelit Google Earth
- Survey Lapangan Tahun 2018

## INSERT INDEKS







# TPU ISLAM MACCINI KELURAHAN MACCINI, KECAMATAN MAKASSAR



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**  
**2018**

## JUDUL SKRIPSI

Analisis Amberg Balas Lahan Pemukiman  
 di Kota Makassar

## JUDUL GAMBAR

Peta Lokasi TPU Islam Maccini

SKALA 1: 1.500



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM  
 Datum Horizontal : WGS 1984 Zone 50 S

## KETERANGAN

— Jalan  
 — Batas Kawasan TPU Islam

## MAHASISWA

Kartini  
 60800114072

## DOSEN PEMBIMBING

1. Nur Syam AS, ST., M.Si  
 2. Fadhl Surur, ST., M.Si

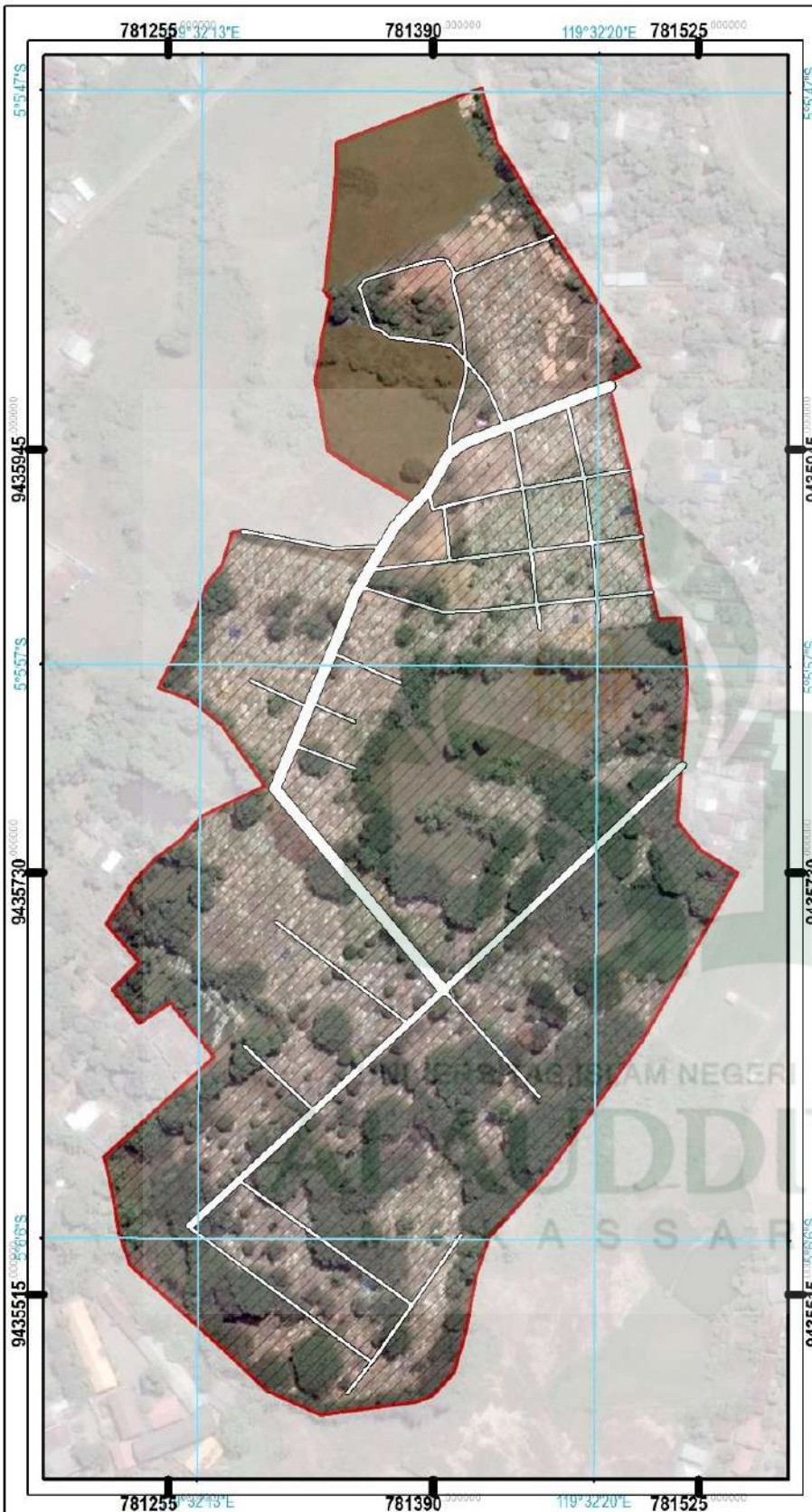
## SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA

- Peta Rupabumi Indonesia Bakosurtanal Skala 1:50.000,  
 Bakosurtanal Tahun 2013  
 - RTRW Kota Makassar  
 - Citra Satelit Google Earth  
 - Survey Lapangan Tahun 2018

## INSERT INDEKS







# TPU ISLAM SUDIANG RAYA

KELURAHAN SUDIANG RAYA, KECAMATAN BIRINGKANAYA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
2018

## JUDUL SKRIPSI

Analisis Ambang Batas Lahan Pemakaman  
di Kota Makassar

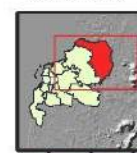
## JUDUL GAMBAR

Peta Lokasi & Kondisi Lahan TPU Islam Sudiang Raya

SKALA 1: 3.000

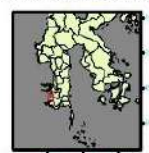


KOTA MAKASSAR



Proyeksi  
Sistem Grid  
Datum Horizontal

PROVINSI SULAWESI SELATAN



Universal Transverse Mercator  
Grid (Gongres dan Grid UTM  
WGS 1984 Zona 50 S

## KETERANGAN

- Jalan
- Batas Kawasan TPU Islam
- ▨ Lahan Terpakai
- ▨ Lahan Tersisa

## MAHASISWA

Kartini  
50000114072

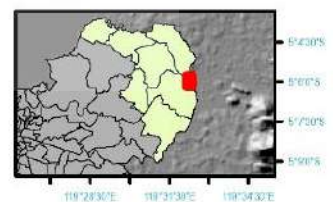
## DOSEN PEMBIMBING

1. Nur Syam AS, ST., M.Si
2. Fadhi Surur, ST., M.Si

## SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA

- Peta Rupabumi Indonesia Bakosurtanal Skala 1:50.000, Bakosurtanal Tahun 2013
- RTRW Kota Makassar
- Citra Satelit Google Earth
- Survey Lapangan Tahun 2018

## INSERT INDEKS







### ***E. Daya Tampung sebagai Ambang Batas***

Setiap manusia yang lahir ke bumi ini akan merasakan kematian dan merupakan suatu hal yang pasti terjadi sedangkan luas lahan pemakaman hingga saat ini berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan makam yang baru. Hasil wawancara dengan beberapa mandor dan pegawai di setiap TPU menjelaskan bahwa di setiap tahunnya jumlah angka kematian semakin meningkat sehingga menyebabkan cara pemakaman yang dilakukan dengan sistem tumpuk terkecuali di TPU Sudiang Raya yang masih terdapat beberapa lahan makam baru.

Untuk mengetahui kemungkinan jumlah angka kematian di tahun berikutnya maka dilakukan analisis proyeksi kematian untuk 20 tahun kedepan yang dirinci per 5 tahun, berikut hasil proyeksi kematian yang beragama Islam di Kota Makassar.

Tabel 13. Proyeksi Kematian Agama Islam untuk 20 tahun kedepan dirinci per 5 tahun di Kota Makassar

No	Tahun Proyeksi	Jumlah Kematian (jiwa)
1	2	3
1	2022	3,830
2	2027	4,239
3	2032	4,647
4	2037	5,055

Sumber : Hasil Analisis, 2018

Hasil proyeksi kematian untuk 20 tahun kedepan menunjukkan bahwa angka kematian akan semakin meningkat sehingga dengan mengetahui hal tersebut dapat dilakukan perhitungan estimasi jumlah lahan yang akan digunakan masyarakat Kota Makassar dengan menggunakan standar ukuran makam sebesar 2,5 m x 1,5 m termasuk jarak antar makam dengan estimasi kebutuhan lahan

pemakaman berdasarkan kondisi dilapangan yakni 2 m x 1 m. Untuk jumlah estimasi kebutuhan lahan pemakaman dapat diketahui melalui tabel dan grafik berikut :

Tabel 14. Estimasi Kebutuhan Jumlah Lahan Pemakaman di Kota Makassar dalam 20 tahun kedepan

No	Tahun Proyeksi	Jumlah Kematian (jiwa)	Jumlah Lahan yang akan digunakan untuk ukuran 2.5 m x 1.5 m (ha)	Jumlah Lahan yang akan digunakan untuk ukuran 2 m x 1 m (ha)
1	2	3	4	5
1	2022	3,380	1.27	0.68
2	2027	4,239	1.59	0.85
3	2032	4,647	1.74	0.93
4	2037	5,055	1.90	1.01
<b>Total</b>		<b>17,771</b>	<b>6.50</b>	<b>3.46</b>

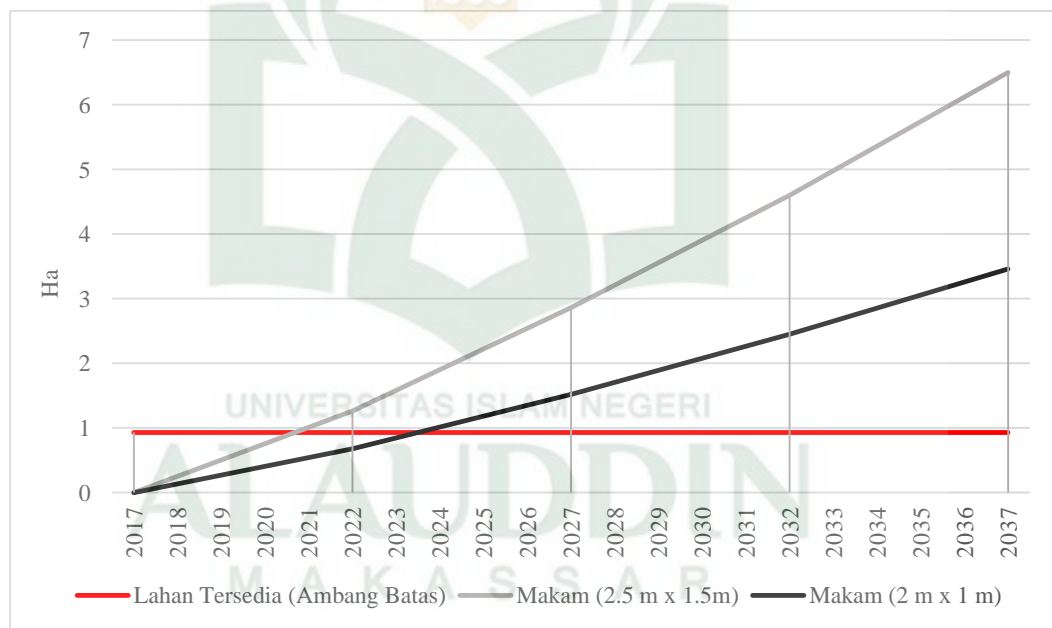
Sumber : Hasil Analisis, 2018

Berdasarkan tabel estimasi jumlah lahan yang akan digunakan untuk lahan pemakaman di Kota Makassar dalam jangka 20 tahun kedepan dapat diketahui bahwa kebutuhan akan semakin meningkat sesuai dengan tingkat kematian sedangkan lahan pemakaman dari tahun ke tahun semakin berkurang tanpa adanya penambahan. Untuk saat ini lahan yang tersisa dari 5 lokasi TPU Islam adalah  $\pm 0,93$  ha yang hanya terdapat di TPU Sudiang Raya karena ke-4 lokasi TPU Islam lainnya telah penuh. Dengan sisa lahan tersebut maka daya tampungnya hanya mampu memenuhi kebutuhan makam sebanyak 2.480 makam dengan ukuran 2,5 m x 1,5 m sedangkan untuk ukuran 2 m x 1 m sebanyak 4.650 makam . Untuk lebih jelasnya dapat diketahui melalui tabel berikut :

Tabel 15. Ambang Batas Kebutuhan Lahan Pemakaman di Kota Makassar

No	Tahun	Jumlah Kematian (Jiwa)	Kebutuhan Lahan Makam Ukuran 2.5 m x 1.5 m (ha)	Kebutuhan Lahan Makam Ukuran 2 m x 1 m (ha)
1	2	3	5	7
1	2022	3,380	0.93	0.93
2	2027	4,239	0	0.25
3	2032	4,647	0	0
4	2037	5,055	0	0

Sumber : Hasil Analisis, 2018



Gambar 18. Grafik Ambang Batas Kebutuhan Lahan Pemakaman di Kota Makassar

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa daya tampung lahan pemakaman Kota Makassar yang tersedia saat ini hanya 0,93 ha dengan kemampuan menampung jumlah kematian sebanyak 2.480 makam untuk ukuran

2,5 m x 1,5 m hanya mampu menampung antara tahun 2020 dengan 2021 sedangkan untuk ukuran 2 m x 1 m mampu menampung jumlah kematian sebanyak 4.650 makam antara tahun 2023 dengan 2024. Sehingga pemenuhan kebutuhan lahan pemakaman untuk 20 tahun kedepan dapat dilakukan dengan pengadaan lahan pemakaman baru sebanyak 5,57 ha untuk ukuran 2,5 m x 1,5 m dan 2,5 ha untuk ukuran 2 m x 1 m.

Meski lahan pemakaman yang tersisa hanya di TPU Islam Sudiang Raya dan tidak pernah mengalami penambahan namun pada kenyataannya masih mampu menampung jumlah kematian hingga saat ini. Hal ini disebabkan karena berlakunya sistem penumpukan mayat yang terjadi di semua TPU Islam. Oleh karena itu, jika dilakukan penerapan sistem penumpukan maka hal ini dapat menampung jumlah kematian hingga beberapa tahun kedepan sehingga dapat dilakukan analisis mengenai ambang batas kebutuhan lahan pemakaman jika dilakukan penumpukan dengan standar 2 orang dalam satu makam. Untuk lebih jelasnya dapat diketahui melalui tabel berikut :

Tabel 16. Daya Tampung Lahan TPU Islam di Kota Makassar dengan

Sistem Pemakaman	Sistem Tumpuk	
	Daya Tampung untuk Ukuran 2.5 m x 1.5 m (jiwa/petak)	Daya Tampung untuk Ukuran 2 m x 1 m (jiwa/petak)
1	2	3
Normal	2,480	4,650
Menumpuk	4,960	9,300

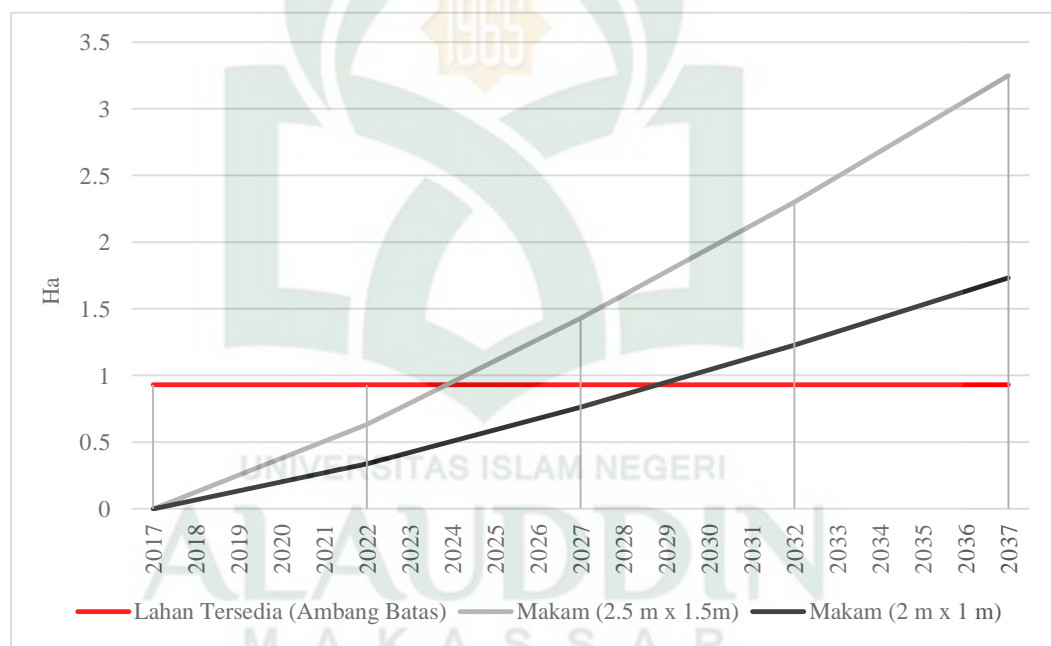
Sumber : Hasil Analisis, 2018



Tabel 17. Ambang Batas Daya Tampung Lahan Pemakaman di Kota Makassar  
dengan Sistem Tumpuk

No	Tahun	Jumlah Kematian (jiwa)	Daya Tampung untuk Ukuran 2.5 m x 1.5 m (jiwa/petak)	Daya Tampung untuk Ukuran 2 m x 1 m (jiwa/petak)
1	2	3	4	6
1	2022	3,380	4,960	9,300
2	2027	4,239	1,130	5,470
3	2032	4,647	0	1,231
4	2037	5,055	0	0

Sumber : Hasil Analisis, 2018



Gambar 19. Grafik Ambang Batas Kebutuhan Lahan Pemakaman di Kota Makassar dengan Sistem Tumpuk

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat diketahui bahwa ambang batas lahan pemakaman di Kota Makassar jika diterapkan sistem tumpuk dengan luas lahan yang tersisa sebanyak  $\pm 0,93$  ha masih mampu menampung jumlah kematian

untuk beberapa tahun kedepan. Untuk ukuran makam 2,5 m x 1,5 m diperkirakan masih mampu menampung jumlah kematian sebanyak 4.960 jiwa hingga tahun 2024 sedangkan untuk ukuran makam 2 m x 1 m masih mampu menampung jumlah kematian sebanyak 9.300 jiwa hingga tahun 2029.

Analisis ini menunjukkan bahwa penerapan sistem penumpukan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan lahan pemakaman Kota Makassar di masa yang akan datang. Sehingga pemenuhan kebutuhan lahan pemakaman untuk 20 tahun kedepan dapat dilakukan dengan pengadaan lahan pemakaman baru dengan penambahan lahan baru sebanyak 2,32 ha untuk ukuran 2,5 m x 1,5 m dan untuk ukuran 2 m x 1 m membutuhkan lahan baru sebanyak 0,8 ha.

#### ***F. Arahana Perencanaan dalam Pengembangan Pemenuhan Kebutuhan Lahan Pemakaman ditinjau dari Aspek Tata Ruang***

Peningkatan jumlah kematian di Kota Makassar diprediksikan akan semakin meningkat setiap tahunnya sehingga kebutuhan lahan pemakaman pun juga akan semakin meningkat. Berdasarkan hasil proyeksi tingkat kematian dan kebutuhan lahan pemakaman, diperoleh bahwa jumlah lahan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan lahan pemakaman selama 20 tahun kedepan dengan sistem pemakaman normal maka untuk ukuran 2,5 m x 1,5 m membutuhkan 5,57 ha lahan baru dan untuk ukuran 2 m x 1 m membutuhkan 2,5 ha lahan baru. Adapun untuk sistem pemakaman tumpuk dibutuhkan lahan baru sebanyak 2,32 ha untuk ukuran 2,5 m x 1,5 m dan untuk ukuran 2 m x 1 m sebanyak 0,8 ha.

Pemenuhan kebutuhan lahan pemakaman dengan pengadaan lahan baru tentu sulit dilakukan di Kota Makassar mengingat bahwa kondisi lahan saat ini

telah dibangun untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang masih hidup. Sehingga beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan lahan pemakaman di Kota Makassar untuk 20 tahun kedepan yang ditinjau dari aspek tata ruang yaitu:

### **1. Peruntukan Makam untuk Masyarakat Kota Makassar**

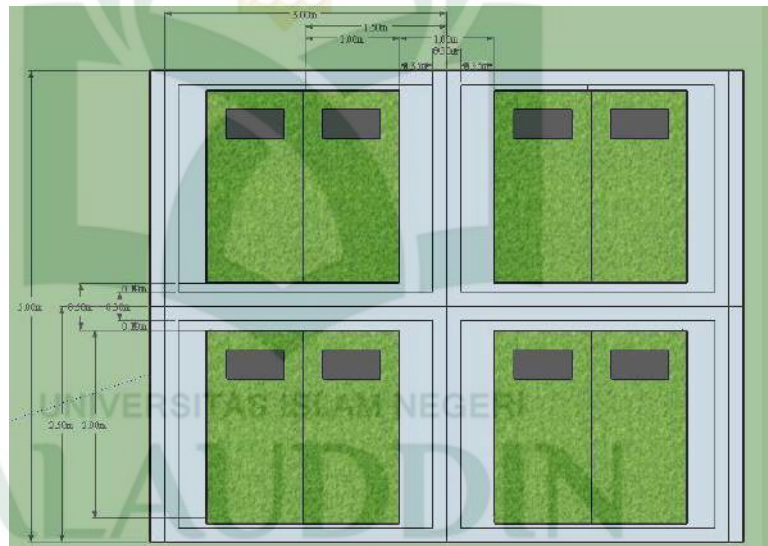
Kondisi lahan pemakaman di Kota Makassar sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang dimakamkan disetiap TPU Islam tidak hanya berdomisili didalam Kota Makassar namun terdapat beberapa masyarakat dari daerah lain juga. Hanya saja, bagi mereka yang berasal dari daerah lain dikenakan biaya yang lebih mahal. Kondisi ini tentu akan mengurangi jumlah lahan pemakaman yang tersedia sehingga sisa lahan pemakaman untuk pemenuhan kebutuhan lahan masyarakat Kota Makassar semakin berkurang.

Lahan pemakaman yang tersisa hingga saat ini sebaiknya hanya diperuntukkan untuk masyarakat Kota Makassar saja dengan syarat memperlihatkan kartu tanda pengenal kepada pihak pelayanan pemakaman kemudian dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sehingga terjadi sinkronisasi mengenai data jumlah penduduk. Peraturan ini harus dilakukan secara tegas agar mampu dilakukan pengoptimalisasian dalam pemenuhan kebutuhan lahan pemakaman.

### **2. Pengoptimalisasian Lahan Pemakaman**

Meningkatnya angka kematian disetiap tahunnya menyebabkan luas lahan pemakaman semakin berkurang sehingga diperlukan pengoptimalisasian dalam penggunaan lahan pemakaman dengan

menggunakan sistem per blok. Dalam satu blok memiliki ukuran 5 m x 3 m yang terdapat 2 makam dengan ukuran satu makam 2 m x 1 m yang setiap sisinya terdapat jarak antar makam sebanyak 1 m. Ukuran 1 m ini akan dijadikan sebagai pekarangan makam sebanyak 0.35 m dibagian sisi kiri atau kanan (samping jalan) dan 0.10 m disetiap sisi atas dan bawahnya sedangkan untuk jalan setapak makam memiliki ukuran 0.30 m yang diperuntukkan untuk peziarah agar tidak melangkahi makam ataupun menginjaknya. Berikut gambar mengenai optimalisasi penggunaan lahan pemakaman Kota Makassar :



Gambar 20. Ukuran Makam dan Model Sistem Blok dalam Pemakaman

### 3. Sistem Penumpukan Makam

Hasil analisis mengenai sistem tumpuk makam dengan standar satu makam terdapat 2 jenazah menunjukkan bahwa keadaan ini mampu menampung jumlah kematian hingga beberapa tahun kedepan. Berdasarkan

hasil wawancara dengan penjaga pemakaman baqi', Madinah pada tanggal 24 Mei 2018 menjelaskan bahwa pemakaman tersebut juga menerapkan sistem penumpukan yang didalam satu makam itu telah terdapat beberapa mayat yang telah dikubur mulai dari sebelum Islam datang hingga saat ini masih digunakan. Sistem penumpukan yang dimaksud yaitu menumpuk makam jika semua makam telah terpakai sehingga meski terdapat puluhan mayat yang meninggal dalam sehari namun setiap mayat akan mengisi satu makam.

Tata cara pemakaman baqi' dapat dijadikan solusi dalam memenuhi kebutuhan lahan pemakaman di Kota Makassar yakni cara pemakaman yang dilakukan secara teratur seperti halnya jika pihak pemakaman melakukan penguburan dari arah barat maka penguburan selanjutnya dilakukan disamping makam sebelumnya hingga ke memenuhi satu baris tersebut ke arah timur. Setelah itu maka mereka akan kembali ke arah barat hingga ke arah timur dan terulang seperti itu hingga lahan pemakaman tersebut akan menjadi penuh. Jika penuh maka dilakukan penggalian kembali dimakam pertama untuk dilakukan sistem penumpukan. Adapun jika terdapat tulang belulang pada proses penggalian maka tulang belulang tersebut akan dikumpulkan dan tetap dikubur dalam makam tersebut.

Periode kematian seseorang tidak dapat ditentukan untuk dilakukan penggalian kembali namun hal ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan makam. Selain itu, pemakaman baqi' tidak ditemukan nisan dan bangunan-bangunan seperti di Kota Makassar yang ada hanyalah sebuah batu. Jika batunya hanya satu merupakan makam laki-laki sedangkan batu yang

terdapat dua merupakan makam perempuan sehingga jenazah laki-laki dan perempuan tidak akan bercampur baur meskipun tidak memiliki nama yang tertera.

Sistem pemakaman yang diterapkan di Saudi Arabia tentu memberikan kemudahan dan sesuai dengan syariat Islam. Kemudahan yang dimaksud dalam artian memudahkan dalam melakukan pembongkaran makam untuk dilakukan penumpukan karena tidak adanya nisan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan makam hingga beribu tahun kedepan. Penerapan sistem pemakaman Saudi Arabia ini tentu dapat dilakukan di Kota Makassar terkhususnya makam seorang muslim agar lahan pemakaman yang tersisa saat ini dapat digunakan untuk beberapa tahun kedepannya.

#### **4. Hutan Lindung sebagai Tempat Pemakaman Umum**

Kota Makassar merupakan salah satu kota yang sedang dalam tahap penyediaan pemenuhan proporsi RTH kota karena hingga saat ini belum mampu memenuhi proporsi ruang terbuka hijau sebesar 30% sehingga dituntut untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan pengadaan lahan yang diperuntukkan untuk Ruang Terbuka Hijau. Secara fisik, RTH dibedakan menjadi RTH alami seperti kawasan lindung, mengingat bahwasanya Kota Makassar belum memiliki hutan lindung maka salah satu hal yang dapat dilakukan dalam pemenuhan RTH tersebut dengan pengadaan lahan baru untuk kawasan hutan lindung.

Kota Makassar yang biasanya mengalami beberapa bencana alam seperti banjir maka sudah sepatutnya dilakukan pengadaan kawasan hutan



lindung agar mampu mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah dan air permukaan. Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung berdasarkan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan pada pasal 24 ayat 2 dijelaskan bahwa kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan :

- a. Tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya
- b. Pengolahan tanah terbatas
- c. Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi
- d. Tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat, dan/atau
- e. Tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam

Dengan kriteria pemanfaatan kawasan hutan lindung maka pengadaan pemenuhan kebutuhan lahan pemakaman Islam di Kota Makassar dapat dipenuhi dengan membuka lahan baru untuk kawasan hutan lindung yang didalamnya dijadikan sebagai lahan pemakaman. Keadaan ini tentu tidak akan mengubah dan mengganggu fungsi utama kawasan hutan lindung karena didalam kawasan tersebut tidak akan ada aktivitas dunia yang terjadi hanya saja aktivitas seperti menggali kubur dan melakukan ziarah. Keadaan ini tentu memberikan kenyamanan terhadap peziarah karena adanya pohon-pohon tersebut memberikan udara yang segar dan suasana yang sejuk tanpa harus berpanas-panasan seperti kondisi saat ini.



## 5. Pemakaman Berdiri

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mengoptimalisasikan lahan pemakaman tersisa di Kota Makassar yakni melakukan pemakaman dengan cara berdiri. Pemakaman berdiri adalah salah satu metode yang dilakukan dengan memasukkan jenazah kedalam tanah dengan posisi diberdirikan sehingga ukuran setiap makam hanya membutuhkan  $\pm 50$  cm x 50 cm dengan tingkat kedalaman disesuaikan dengan tinggi jenazah.

Keadaan ini tentu akan lebih optimal dalam memanfaatkan lahan pemakaman tersisa yang ada di Kota Makassar. Selain itu, setiap makam juga tidak perlu diberi nisan dengan bangunan mewah, cukup dengan memberi tanda pengenal saja bahwasanya daerah itu terdapat makam seseorang.

## 6. Pemindahan Makam

Permasalahan lahan pemakaman tidak hanya terjadi di Kota Makassar namun di beberapa negara seperti Singapura dan Hongkong juga mengalami permasalahan tersebut. Menurut VOA (2012) mengungkapkan bahwa Singapura dan Hongkong memiliki kebijakan terkait lahan pemakaman. Salah satu kebijakan di Singapura yang dapat dijadikan solusi dalam mengatasi permasalahan lahan pemakaman di Kota Makassar yakni membuat suatu kebijakan akan periode pemakaman menjadi 15 tahun. Setelah lama kematian seorang jenazah mencapai 15 tahun maka dilakukan penggalian dan kremasi sehingga hasil kremasi ini akan disimpan didalam sebuah gedung yang kebutuhan lahannya hanya sedikit namun mampu menampung beberapa abu jenazah.

Berbeda halnya dengan kebijakan di Hong Kong yang juga dapat dijadikan sebagai solusi mengatasi permasalahan pemakaman di Kota Makassar yakni menerapkan periode pemakaman selama 6 tahun kemudian jika pihak keluarga tidak melakukan pemindahan pemakaman maka pihak berwenang akan menggali dan mengkremasi jenazah. Abu jenazah dari hasil kremasi nanti akan dikubur kembali disuatu pemakaman lain yang telah dijadikan sebagai kawasan penguburan abu kremasi.

## **7. Pembuangan Abu Kremasi**

Semakin tingginya biaya pemakaman dan jumlah kematian serta terbatasnya lahan pemakaman menyebabkan orang-orang di Jepang melakukan perubahan tradisi pemakaman dengan melakukan pelarungan abu anggota keluarga ke laut (Firman, 2018). Metode ini tentu sangat optimal jika dilakukan di Kota Makassar yang saat ini membutuhkan lahan pemakaman karena metode ini tidak membutuhkan lahan pemakaman lagi sehingga yang diperlukan hanyalah lahan untuk membangun tempat kremasi. Kemudian abu kremasi tersebut akan disimpan didalam guci dan dibawa untuk dilarungkan di laut.

Metode pelarungan abu jenazah di laut sangat mudah dan menghemat lahan pemakaman di Kota Makassar yang saat ini hanya tersisa  $\pm 0,93$  Ha. Dengan sisa lahan pemakaman saat ini dapat dijadikan sebagai tempat untuk melakukan kremasi dan menyediakan guci untuk digunakan saat melakukan pelarungan abu kremasi atau dapat pula dilakukan pembuangan abu kremasi diudara. Namun sistem kremasi ini dapat dijadikan solusi terkhususnya kepada penganut agama hindu.

## 8. Pemakaman Terpadu

Kondisi Kota Makassar yang saat ini memiliki lahan pemakaman yang sudah sangat terbatas bukan sebuah alasan untuk tidak memikirkan solusi yang dapat dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Kota Makassar dapat melakukan kerja sama dengan beberapa Kabupaten tetangga seperti yang tergabung dalam Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar) yang juga termasuk Kawasan Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2011.

Pengadaan pemakaman terpadu ini dapat diadakan di beberapa Kabupaten yang termasuk dalam wilayah Mamminasata namun pihak Kota Makassar tetap memberikan sumbangsih dalam pengadaan lahan pemakaman tersebut seperti biaya pembebasan lahan yang ditanggung dan lain sebagainya. Sehingga dalam sistem pemakaman terpadu ini diperlukan kerja sama antar daerah.

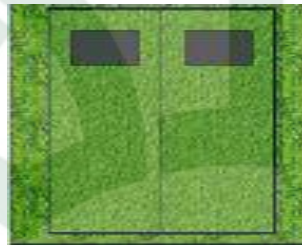
Sistem pemakaman terpadu dilakukan dengan mempersiapkan seluruh prosesi kematian mulai dari tahap memandikan hingga menguburkan. Dalam pemakaman tersebut akan dilengkapi fasilitas seperti mobil pengantaran jenazah, masjid, lahan parkir, jalan utama, jalan setapak (diantara makam akan terdapat jalan setapak yang memudahkan peziarah agar tidak melangkahi/makam) serta pada saat penguburan akan dilayani proses penggalian dan penutupan tanah makam, dipasangkan tenda, dilengkapi kursi dan *sound system*, terdapat ustadz dan akan di dokumentasikan.

## 9. Pemakaman Ideal

Seorang muslim memiliki pedoman hidup yang terdapat didalam al-qur'an dan hadis sehingga segala sesuatu yang dikerjakan didunia ini telah memiliki aturan yang berasal dari Allah SWT. Ketika seorang muslim meninggal dunia maka prosesi yang dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam seperti halnya dalam tahap penguburan jenazah.

Terkait dengan penjelasan hadis mengenai model penguburan yang sesuai syariat Islam (lihat hal. 88 dan 89 ) maka hal ini dapat dijadikan dasar dalam pengadaan pemakaman ideal yang merupakan model pemakaman yang berbasis syariah. Adapun model pemakaman ideal tersebut yaitu :

1. Terdapat tanda batu atau lainnya diatas setiap makam



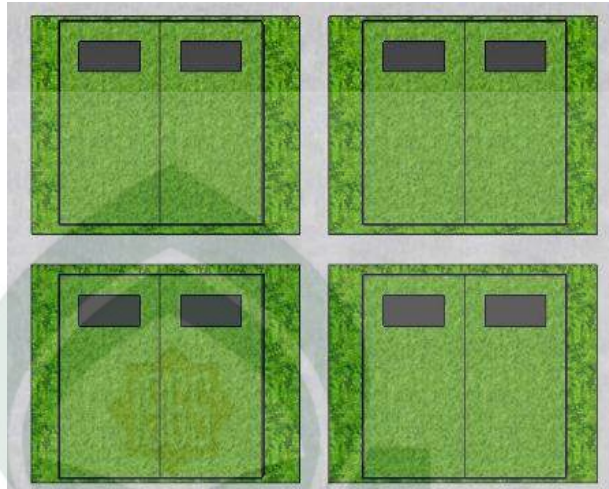
Gambar 21. Ilustrasi Bentuk setiap Makam

2. Tidak diperbolehkan menulis dan menambahkan sesuatu diatas kuburan sehingga setiap makam terlihat sederhana yang hanya terdiri dari gundukan tanah.



Gambar 22. Ilustrasi Model Pemakaman yang sesuai Syariat Islam

3. Makam tidak diperbolehkan untuk dilangkahi, diduduki dan dinjak-injak sehingga setiap antara makam terdapat jalan setapak.



Gambar 23. Ilustrasi Jalan Setapak diantara Makam

4. Membuat papan informasi sebagai bentuk sosialisasi ke masyarakat mengenai model pemakaman yang sesuai syariat Islam.



Gambar 24. Ilustrasi Papan Informasi disetiap Pemakaman



### ***G. Tinjauan Hukum Islam tentang Penguburan Jenazah***

Memenuhi kebutuhan lahan pemakaman di Kota Makassar dapat dilakukan dengan melakukan pengoptimalisasian terhadap sisa lahan yang ada dengan cara seperti peruntukan makam untuk masyarakat Kota Makassar, pengoptimalisasian ukuran makam, sistem penumpukan makam, menjadikan hutan lindung sebagai tempat pemakaman umum, pemakaman berdiri, pemindahan makam, pembuangan abu kremasi, pemakaman terpadu dan pemakaman ideal. Namun dari berbagai cara tersebut perlu dilakukan peninjauan hukum Islam sebab pemakaman yang dimaksud akan digunakan oleh jenazah seorang muslim sehingga harus sesuai dengan aturan agama Islam.

Seorang muslim yang telah meninggal memiliki empat perkara yang merupakan hak mayit yang wajib dilakukan oleh siapa saja yang menghadirinya, baik dari pihak keluarga maupun bukan yaitu memandikannya, mengkafaninya, menshalatinya dan menguburkannya (Tuasikal, 2013). Terkait dengan hak mayit seperti menguburkannya merupakan suatu kewajiban meskipun seorang kafir dan tidak boleh menguburkan seorang muslim dengan seorang kafir, begitu pula sebaliknya, harus dipekuburan masing-masing. Menurut Sugiyantoro (2011) mengenai mengangkat dan mengubur mayat merupakan penghormatan kepadanya dan hukumnya adalah fardhu kifayah. Allah berfirman pada QS. Al-Mursalat (77) ayat 25-26.

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۖ (٢٥) أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ۖ (٢٦)

*Terjemahnya :*

*Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul. Orang-orang hidup dan orang-orang mati (Departemen Agama RI, 2007).*



Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 28

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya :

*Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (Departemen Agama RI, 2007).*

QS. ‘Abasa (80) ayat 21

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿٢١﴾

Terjemahnya

*Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya kedalam kubur (Departemen Agama RI, 2007).*

Setiap makam harus digali dalam-dalam, diluaskan, diperbaiki. Diriwayatkan dari Hisyam bin ‘Amir Radhiyallahu anhu, dia berkata, “Seusai perang Uhud, banyak korban yang berjatuh dari kaum muslimin, dan sebagiannya lagi terluka, maka kami berkata, ‘Wahai Rasulullah, untuk menggali lubang bagi setiap korban tentu sangat berat bagi kami, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?’ Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab :

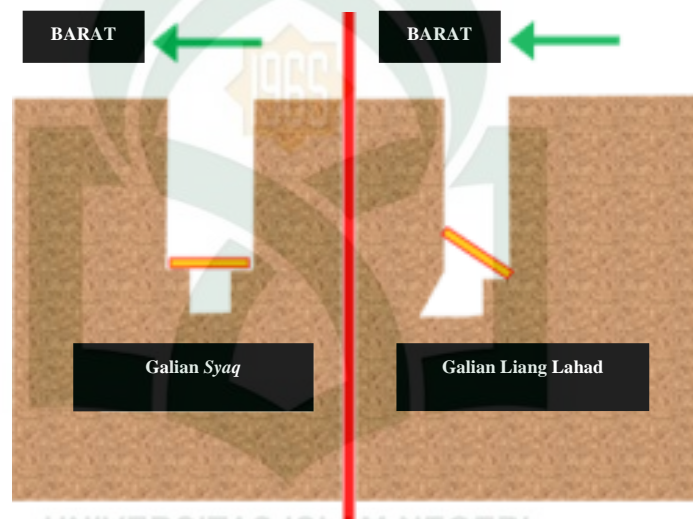
احْفَرُوا, وَأَوْسِعُوا, وَأَعْمِقُوا, وَأَحْسِنُوا, وَادْفِنُوا الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ, وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا قَالِ فَكَانَ أَبِي ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ, وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا, فَقَدِّمَ.

“Galilah, lebarkanlah, perdalamilah, dan baguskanlah, kuburlah dua atau tiga orang dalam satu liang lahad, dan dahulukan mereka yang paling banyak menguasai al-Qur-an.” Hisyam berkata, “Ayahku adalah salah satu dari tiga orang yang akan dikuburkan, dan dia paling banyak menguasai al-Qur-an, maka dia pun didahulukan.” (Shahih: [Ahkamul Janaa-iz, hal. 146], Sunan an-Nasa-i (IV/80), Sunan Abi Dawud (‘Aunul Ma’buud) (IX/34, no. 3199), Sunan at-Tirmidzi (III/128, no. 1766)).

Apabila telah sampai bagian bawah kubur, digalilah padanya yang mengarah kiblat satu tempat sekadar diletakkan mayit atau disebut dengan lahad yang lebih utama dari pada syaq yang merupakan cara melubangi ke bawah di pertengahan liang kubur. Kedua cara tersebut diperbolehkan karena telah dilakukan

pada zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, hanya saja cara yang pertama lebih utama. Telah diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata,

*“Ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam meninggal, di Madinah ada dua orang yang dikenal sebagai penggali kubur, yang satu dengan cara al-lahad (membuat lubang di sisi kubur yang mengarah ke arah Kiblat) dan yang lainnya dengan asy-syaqq (menggali ke arah bawah seperti menggali sungai). Para Sahabat berkata, “Kita shalat istikharah, lalu kita panggil keduanya. Dan siapa yang paling cepat datang kita tinggalkan yang lainnya. Ternyata penggali kubur (dengan cara membuat lahad) yang lebih cepat datang, maka para Sahabat segera menggali kubur untuk pemakaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (Sanadnya hasan: Sunan Ibnu Majah (1/496, no. 1557)).*



Gambar 25. Bentuk Liang Lahad  
Sumber : Rumaysho.com dalam Tuasikal (2013)

Hendaklah mayit diletakkan dalam kuburnya dengan posisi berbaring di atas lambung kanan, dengan wajah menghadap ke arah Kiblat, sementara kepala dan kedua kakinya ke arah kanan dan kiri kiblat (Abdul Hamid, 2004). Selain itu, mayit dimasukkan dalam kubur dengan mengakhirkkan kepala dan dimasukkan dengan lemah lembut (Tuasikal, 2013). Inilah yang dilakukan sejak zaman Rasulullah hingga masa sekarang ini.

Menurut Sugiyantoro (2011) mengenai perkara yang disunnahkan setelah mengubur mayat terdapat beberapa hal, yaitu :

1. Untuk meninggikan kuburan sedikit dari tanah sekedar satu jengkal, dan tidak diratakan dengan tanah supaya berbeda dengan yang lain, sehingga bisa terjaga dan tidak dihinakan. Karena hadits Jabir Radhiyallahu ‘anhu :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدَ لَهُ لِحْدًا وَنَصَبَ عَلَيْهِ اللَّيْنُ نَصْبًا وَرَفَعَ قَبْرَهُ مِنَ الْأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ (رواه ابن حبان والبيهقي)

*“Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menggali liang lahad dan menancapkan batu bata dan meninggikan kuburan sekedar satu jengkal.” (HR Ibnu Hibban dan Al Baihaqi, dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani).*

2. Hendaknya kuburan dijadikan membulat bagian permukaannya (seperti punuk onta). Karena di dalam hadits Sufyan At Tammar disebutkan:

رَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَقَبْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ) مَسْنَمًا (رواه البخاري)

*“Aku melihat kubur Nabi (dan kubur Abu Bakar dan Umar) membulat.” (HR Bukhari).*

3. Agar diberi suatu tanda dengan batu atau yang lainnya, supaya dikuburkan di dekatnya orang yang mati dari keluarganya. Karena ketika Utsman bin Madh’un meninggal dunia, beliau meminta untuk diambilkan sebuah batu, kemudian beliau meletakkannya di dekat kepalanya. Dan beliau bersabda:

أَتَعْلَمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي (رواه أبو داود)

*“Supaya aku mengetahui kuburan saudaraku dan aku akan mengubur di dekatnya orang yang mati dari keluargaku.” (HR Abu Dawud).*

4. Tidak diperbolehkan menulis sesuatu di atas kuburan.

Diriwayatkan dari Jabir Radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata:

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا وَأَنْ تُوْطَأَ (رواه الترمذي)

*“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang di atas kuburan diberi warna dan ditulis sesuatu. Dan Beliau melarang di atasnya dibangun dan diinjak.” (HR At Tirmidzi).*

5. Tidak boleh menambahkan sesuatu di atas kuburan, baik dengan tanah atau bangunan. Karena hadits Jabir Radhiyallahu ‘anhu yang marfu’, beliau berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ... (رواه النسائي)

*“Rasulullah melarang mendirikan bangunan di atas kuburan atau ditambahkan kepadanya tanah.” (HR An Nasa-i, dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani).*

6. Diharamkan mengubur satu mayat di atas kuburan orang lain, kecuali diperkirakan kuburan yang pertama sudah menjadi tanah. Dalilnya, ialah apa yang dikerjakan kaum muslimin sejak zaman Nabi hingga zaman sekarang, bahwa seseorang di kuburnya sendirian. Syaikh Ibnu Utsaimin t berkata:

*“Tidak ada bedanya ketika mengubur dalam satu waktu, yaitu dimasukkan dua kuburan secara bersamaan atau hari ini dikubur seseorang kemudian besok dikubur orang lain,” kemudian beliau berkata: “Kecuali dalam keadaan darurat, seperti banyaknya orang yang mati, kemudian orang yang menguburnya sedikit. Dalam kondisi seperti ini, tidak mengapa apabila dimasukkan dua atau tiga orang dalam satu kuburan.”*

7. Disunnahkan untuk mengumpulkan kerabat yang mati di satu pekuburan, dan haram hukumnya mengumpulkan beberapa mayat dalam satu liang lahad, kecuali ada hal darurat.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta tentang Hukum Menimpa Jenazah dalam Muaz (2014) memutuskan setelah mengkaji permasalahan pemakaman berdasarkan Al-Qur'an, Al-Sunnah dan pendapat (qaul) yang mu'tabar menetapkan fatwa sebagai berikut :

1. Pada dasarnya Islam sangat memuliakan jenazah, sebagaimana menghormati yang masih hidup. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra (17) :70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ..... ﴿٧٠﴾

Terjemahnya :

*"Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam....."(Departemen Agama RI, 2007).*

Dan hadist 'Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

كَسَرُ عَظْمٍ أَمَيَّتٍ كَكَسْرِ حَيًّا

*"Bahwa memecahkan tulang mayit seperti memecahkannya pada waktu dia hidup". (Hadist Shahih Riwayat Abu Daud, no. 2792, Ibnu Majah, no. 1605, dan Ibnu Hibban, no. 3167)*

2. Dalam keadaan normal dan cukup tersedianya lahan pemakaman, hukumnya haram menimpa (replace) jenazah yang lama dengan jenazah yang baru karena perbuatan itu dianggap mencederai kehormatan jenazah yang lama dan juga akan menimbulkan bau yang tidak sedap pada waktu penggalian. Dijelaskan dalam kitab Mughni al-Muhtaj, yang artinya :

وَقَدْ أَطْفُوْا تَحْرِيمَ إِذَا خَالَ مَيِّتٍ لَمْ فِيْهِ مِنْ هُنَاكَ حُرْمَةِ الْأَوَّلِ وَظُهُورِ رَأْسِهِ

*"Ulama menyepakati hukum haram menimpa jenazah yang lama dengan jenazah yang baru karena dianggap mencederai kehormatan jenazah yang lama, di samping akan menimbulkan bau yang tidak sedap".*



3. Dalam kondisi darurat (misalnya tidak ada lahan lain untuk pemakaman), hukum menimpa (mereplace) jenazah lama dengan jenazah yang baru diperbolehkan, kalau diyakini tulang-belulang jenazah yang lama seluruhnya sudah hancur atau telah menyatu dengan tanah dan jenazah itu bukan ulama atau seorang wali yang sudah masyhur. Keterangan itu dinyatakan dalam kitab al-Hawasyi al-Syarwani, yang artinya :

أَدْخَلَ أَمِيَّتَ عَلَى آخِرِ الْوَفَى الظَّيَادِي وَمَحَلَّ تَحْرِيْمِهِ عِنْدَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ  
مَا عِنْدَهَا فَيَجُوزُ كَمَا فِي الْأَبْتَدَاءِ رَمَلِي أَنْتَهَى . عَشْرُ قَوْلِهِ : ( قَبْلَ بَلِّ جَمِيعِهِ ) أَوْ  
فَهْمُ جَوَازِ النَّبْشِ بَعْدَ بَلِّ جَمِيعِهِ وَبَسْتَنَتْنِي قَبْرَ عَالِمٍ لَمْ يَشْهُرْ أَوْ وَلِيٍّ مَشْهُورٍ فَيَمْتَنَعُ  
نَبْشُهُ مَطْلَقًا

*“Menimpa (mereplace) jenazah yang satu dengan jenazah yang lain diperbolehkan. Dijelaskan dalam kitab al-Ziyady, letak keharamannya – menurut Imam Ramly- kalau tidak ada darurat. Kalau ada darurat, sejak awal diperbolehkan menimpa atau menggabung beberapa jenazah. Perkataannya, “Keharaman itu juga berlaku ketika tulang-belulang jenazah belum hancur seluruhnya” memberikan pemahaman bahwa menggali kuburan untuk (replacing jenazah) kalau tulang belulang jenazah telah hancur semuanya. Kebolehan ini dikecualikan (tidak berlaku) bagi jenazah orang alim atau jenazah wali yang sudah masyhur. Maka, kuburannya haram secara mutlak untuk digali”.*

4. Tenggang waktu seluruh tulang-belulang jenazah dipastikan sudah hancur atau telah menyatu dengan tanah, antara satu daerah/Negara dengan daerah/negara lain ukuran waktunya bisa berbeda-beda tergantung iklim, cuaca, keadaan (struktur) tanah, dan lain-lain. Untuk mengukur (mengira-ngira) bahwa seluruh tulang-belulang jenazah sudah hancur, perlu diteliti ahli geologi (ahlikhibrah):

وَيَحْرَمُ أَيْضًا : أَدْخَالَ مَيِّتَ عَلَى آخِرِ ، وَأَنْ اتَّحَدَ جَنْسًا ، قَبْلَ بَلَاءِ جَمِيعِهِ ، وَيُرْجَعُ فِيهِ لَا هَلَاقَ  
لِخَبْرَةِ بَالَارِضِ



*“Juga dihukumi haram, menimpa jenazah yang satu dengan jenazah yang lain meskipun dari jenis kelamin yang sama, ketika diyakini tulang-belulang jenazah belum hancur seluruhnya. Kepastian tulang-belulang jenazah sudah hancur didasarkan pada pendapat orang (pakar) pertanahan (ahli geologi)”.*

5. Apabila dalam proses penggalian kuburan untuk menimpa jenazah yang lama dengan jenazah yang baru sebagian tulang jenazah yang lama kelihatan, maka penggalian tidak boleh diteruskan, kecuali darurat. Misalnya tidak ada lahan pemakaman yang lain. Tetapi, jika sebagian tulang-belulang jenazah yang lama kelihatan sebagian tulang-belulang jenazah yang lama kelihatan setelah proses penggalian selesai, maka tulang-belulang yang lama diletakkan di sebelah jenazah yang baru, atau ditaruh di atasnya dengan dipisah tanah atau papan:

وَيَحْرُمُ أَيْضًا إِذْ خَالَ مَيِّتٍ عَلَى آخَرٍ وَأَنْ اتَّخَذَا قَبْلَ بُلَى جَمِيعِهِ ... وَلَوْ وَجَدَ عَظْمَةً ... قَبْلَ كَمَالِ الْحَفْرِ طَمَّهْ وَجُوبًا مَا لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ

*“Juga dihukumi haram, menimpa jenazah yang lama dengan jenazah yang baru meskipun dari jenis kelamin yang sama, sebelum tulang-belulang jenazah yang lama seluruhnya hancur... jika ditemukan sebagian tulang jenazah yang lama kelihatan, maka penggalian tidak boleh diteruskan, kecuali darurat”.*

6. Apabila tidak ada lahan pemakaman yang lain sedangkan jika sebagian tulang-belulang jenazah yang lama kelihatan setelah proses penggalian selesai, maka tulang-belulang jenazah yang lama diletakkan di sebelah jenazah yang baru, atau ditaruh di atasnya dengan dipisah tanah atau papan.

Dengan beberapa penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa arahan-arahan yang telah dijelaskan tadi tidak serta merta dapat dilakukan di Kota Makassar terlebih karena pemakaman ini akan digunakan oleh seorang muslim. Oleh karena itu arahan yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam yaitu peruntukan

makam untuk masyarakat Kota Makassar, pengoptimalisasian lahan pemakaman, menjadikan hutan lindung sebagai tempat pemakaman umum, pemakaman terpadu dan pemakaman ideal. Sedangkan untuk sistem penumpukan jika masih terdapat lahan maka hukumnya haram tetapi jika keadaannya sudah darurat dalam artian sudah tidak terdapat lahan pemakaman lagi maka arahan sistem penumpukan hukumnya diperbolehkan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan data dan hasil analisis yang dilakukan, maka dihasilkan kesimpulan berdasarkan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Besaran ambang batas lahan pemakaman umum islam di Kota Makassar dengan menggunakan analisis daya tampung menunjukkan bahwa daya tampung lahan pemakaman Islam Kota Makassar masih mampu menampung hingga tahun 2023 dengan sistem normal sedangkan untuk sistem tumpuk mampu menampung hingga tahun 2029.
2. Arahan perencanaan dalam pengembangan pemenuhan kebutuhan lahan pemakaman ditinjau dari aspek tata ruang dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu : peruntukan makam untuk masyarakat Kota Makassar, pengoptimalisasian lahan pemakaman, sistem penumpukan makam, hutan lindung sebagai tempat pemakaman umum, pemakaman berdiri, pemindahan makam, pembuangan abu kremasi, pemakaman terpadu dan pemakaman ideal. Namun berdasarkan tinjauan hukum islam tentang penguburan jenazah maka solusi yang dapat dilakukan adalah peruntukan makam untuk masyarakat Kota Makassar, pengoptimalisasian lahan pemakaman, menjadikan hutan lindung sebagai tempat pemakaman umum, membuat sistem pemakaman terpadu dan pemakaman ideal serta sistem penumpukan jika kondisi lahan sudah tidak ada lagi yang tersedia.

## ***B. Saran***

### **1. Bagi Pemerintah**

- a. Harusnya membuat aturan yang tegas akan ketertiban didalam pemakaman, aturan yang terkait dengan sistem penumpukan, dan aturan mengenai memberi bangunan diatas kuburan
- b. Sebaiknya melakukan kerja sama dengan Kabupaten tetangga yang tergabung dalam Mamminasata untuk mewujudkan Kawasan Pemakaman Terpadu.
- c. Segera menetapkan solusi sebelum lahan yang tersisa saat ini menjadi penuh lagi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan lahan pemakaman di Kota Makassar.
- d. Menghimbau kepada masyarakat Kota Makassar agar tradisi pemakaman yang saat ini terjadi dilapangan ditinggalkan dan mulai menggunakan model pemakaman yang sesuai dengan syariat islam.
- e. Kawasan reklamasi dapat pula dibebaskan lahan untuk diperuntukkan kawasan pemakaman terpadu yang sesuai dengan syariat islam dan menjadi pemakaman percontohan.

- ### **2. Bagi Penulis yang ingin melanjutkan penelitian ini dapat menganalisis lahan pemakaman umum untuk semua agama agar hasil yang didapat dalam penelitian tentang lahan pemakaman di Kota Makassar ini lebih lengkap.**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, A. A. (2004, Maret 10). *Ringkasan Cara Pelaksanaan Jenazah*. Retrieved from almanhaj.or.id: <https://almanhaj.or.id/438-ringkasan-cara-pelaksanaan-jenazah.html>.
- Adhyaksa, A. (2017). *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelayanan Pemakaman Di Kota Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Affandy, S. (2015). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman Modern di Kabupaten Karawang*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Agustiar, A. A. (2017). *Laporan Praktikum Teknik Pengujian Mutu Hasil Perikanan Uji Treshold*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Aji, A. S., Suprayogi, A., & Wijaya, A. P. (2015). Analisis Kesesuaian Kawasan Peruntukan Pemakaman Umum Baru Berbasis Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Geodesi Undip Vol.4 No.3*, 100.
- Amalia, G. (2016). *Ketersediaan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Makassar*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Amin, A. S. (2011). *Kajian Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berhubungan dengan Perkembangan Embrio Pada Manusia*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Arifin, Y. N. (2016). Optimalisasi Usaha Penyediaan Lahan Pemakaman dalam Kawasan Perumahan di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Geografi Volume 13 No.1*, 80.
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar Tahun 2017.
- Basit, A. (2014). *Kematian dalam Al-Qur'an : Perspektif Ibn Kathir*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Departemen Agama RI. (2007). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Darus Sunnah.
- Farhan, N. (2016). Estimasi Kebutuhan Lahan Pemakaman Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Vol.1 No.1*, 152-153.
- Firman, T. (2018, Februari 19). *Tren Kremasi Jenazah Meningkat Akibat Lahan Kuburan Makin Sempit*. Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/tren-kremasi-jenazah-meningkat-akibat-lahan-kuburan-makin-sempit-cEYr>.



- Istiqomah, Y. L. (2016, Juli 30). *Kehormatan Muslim Yang Telah Meninggal Tetap Terjaga*. Retrieved from almanhaj.or.id: <https://almanhaj.or.id/5452-kehormatan-muslim-yang-telah-meninggal-tetap-terjaga.html>.
- Jawas, Y. '. (2010, November 5). *Proses Penciptaan Manusia dan Ditetapkannya Amalan Hamba (1)*. Retrieved from almanhaj.or.id: <https://almanhaj.or.id/2884-proses-penciptaan-manusia-dan-ditetapkannya-amalan-hamba-1.html>.
- Jalaluddin, M. (2013). *Analisis Kesesuaian dan Ketersediaan Lahan serta Arahan Pengembangan Komoditas Pertanian di Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Kartikasari, D. (2011). *Pengaruh Luas Lahan, Modal, dan Tenaga Kerja terhadap Hasil Produksi Padi di Kecamatan Keling Kabupaten Jepara*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.
- Kozlowski, J. (1997). *Pendekatan Ambang Batas Dalam Perencanaan Kota, Wilayah dan Lingkungan Teori dan Praktek*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Kurniawati, F. E. (2010). *Perkembangan Struktur Ruang Kota Semarang Periode 1960-2007 (Studi Pengembangan Struktur Ruang dari Masa Pasca Kolonial Sampai 2007)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kuswartojo, T., Rosnarti, D., Effendi, V., K, R. E., & Sadi, P. (2005). *Perumahan dan Permukiman Indonesia*. Bandung: Penerbit ITB.
- Muaz. (2014, Desember 27). *Hukum Menimpa (Replace) Jenazah*. Retrieved from muidkijakarta.or.id: <http://www.muidkijakarta.or.id/hukum-menimpa-replace-jenazah/>.
- Muta'ali, L. (2012). *Daya Dukung Lingkungan untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG).
- ..... (2015). *Teknik Analisis Regional*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG).
- Notohadiprawiro, T. (2006). *Kemampuan dan Kesesuaian Lahan : Pengertian dan Penetapannya*. Yogyakarta: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat di Kota Makassar.
- Sada, H. J. (2016). Manusia dalam Perspektif Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Volume 7* , 130-141.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 9*. Ciputat, Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- ..... (2007). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 10*. Pisangan, Ciputat, Tangerang: Penerbit Lentera Hati.
- Staf. (2018, Maret 14). *Arti Makna Pengertian dan Definisi dari Nilai Ambang Batas*. Retrieved from Apaarti.com: <https://www.apaarti.com/nilai-ambang-batas.html>.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Tangerang: PT RajaGrafindo Persada.
- Sujarto , D. (2003, Januari 1). *Perencanaan Tata Ruang Wilayah*. Retrieved from Urban Planning & Design Research Grup: [http://www.sappk.itb.ac.id/ppk/index.php?option=com\\_content&task=view&id=63&Itemid=80](http://www.sappk.itb.ac.id/ppk/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=80).
- Sugiyantoro, A. A. (2011, Mei 17). *Bimbingan Mengurus Jenazah (2)*. Retrieved from almanhaj.or.id: <https://almanhaj.or.id/3071-bimbingan-mengurus-jenazah-2.html>.
- Sofian, E. (2015). Rancang Bangun Sistem Informasi dalam Layanan dan Pemetaan Lokasi Pemakaman pada Pemakaman Umum di Wilayah Jakarta. *STIMIK ESQ Volume 1 Nomor 1*, 52-54.
- Syahr, F. (2012). Pengaruh Faktor Artifisial terhadap Perkembangan Kota. *Jurnal Skala Volume 2 Nomor 4*, 50-55.
- Tarigan, R. (2012). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tuasikal, M. A. (2013, Desember 9). *Ringkasan Pengurusan Jenazah*. Retrieved from Rumaysho.com : <https://rumaysho.com/4905-ringkasan-pengurusanjenazah.html>.
- Tukiman. (2007). Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol.7 No.2*, 103.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- VOA. (2012, November 12). *Singapura Kekurangan Lahan Pemakaman*. Retrieved from VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/singapura-kekurangan-lahan-pemakaman/1554328.html>.
- Wulandari, A. (2014). Kajian Potensi Pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau Perkotaan. *Langkau Betang Vol.1 No.2*, 54-55.
- Yusuf, R. (2016). *Studi Alih Fungsi Lahan Pertanian pada Kawasan Perkotaan Sungguminasa*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Zuliyanto, A. (2015). *Penataan Lokasi Pemakaman Kota Malang Berbasis Geographic Information System Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**KARTINI** Lahir di Pangkajene tanggal 21 April tahun 1996, ia merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan **H. Muh. Yunus** dan **Hj. Muliana Pani** yang merupakan suku bugis dan tinggal serta menetap di Kabupaten Sidenreng Rappang. Ia menghabiskan masa pendidikan Taman Kanak-kanak di TK As'Adiyah pada tahun pelajaran 2000/2001 s/d 2001/2002. Setelah itu melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah dasar di SD Negeri 1 Tanrutedong pada tahun pelajaran 2002/2003 s/d 2007/2008, lalu pada akhirnya mengambil pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Pangsid pada tahun pelajaran 2008/2009 s/d 2010/2011 dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Pangsid pada tahun pelajaran 2011/2012 s/d 2013/2014. Hingga pada akhirnya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di UIN Alauddin Makassar melalui penerimaan jalur Ujian Masuk Mandiri (UMM) dan tercatat sebagai Alumni Mahasiswi Program Studi Sarjana (S1) pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar setelah berhasil menyelesaikan bangku kuliahnya selama 3 tahun 10 bulan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R